



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS AKUNTABILITAS PROGRAM BANTUAN
PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM IPA
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN GRESIK
JAWA TIMUR**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar
Magister Administrasi

ANDI ANDANGATMADJA

0906589002


**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
JAKARTA
2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Andi Andangatmadja

NPM : 0906589002

Tanda Tangan : 

Tanggal : Juli 2012

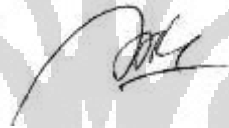
LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : Andi Andangatmadja

NPM : 0906589002

JUDUL TESIS : Analisis Akuntabilitas Program Bantuan
Pembangunan Ruang Laboratorium IPA pada
Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik,
Jawa Timur

Telah disetujui
Pembimbing



(Prof. Dr. Azhar Kasim MPA, Ph.D)

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Nama : Andi Andangatmadja
NPM : 0906589002
Judul : Analisis Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Eko Sakapurnama, MBA

Pembimbing : Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA, Ph.D

Penguji : Dr. Roy V. Salomo, M.Soc., Sc.

Sekretaris Sidang : Achmad Lutfi, S.Sos, M.Si

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : Juli 2012

Handwritten signatures of the exam board members: Eko Sakapurnama, Prof. Dr. Azhar Kasim, Dr. Roy V. Salomo, and Achmad Lutfi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Analisis Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai masukan bagi pengembangan program-program bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang menggunakan mekanisme swakelola, serta masukan bagi para peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan akuntabilitas.

Tesis ini bisa selesai atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik ketika masa perkuliahan, proses bimbingan, saat penelitian lapangan, sampai pada penyusunan tesis ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA, Ph.D yang telah membuka wawasan penulis dengan penuh perhatian memberikan bimbingan hingga selesainya penyusunan tesis ini.
3. Dr. Roy V. Salomo, M.Soc., Sc. Selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
4. Seluruh Dosen Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Pendidikan yang telah memberikan tambahan ilmu dan wawasan.
5. Kepala Sekolah SMPN 1 Driyorejo, SMPN 1 Balongpanggang, SMPN 1 Menganti, SMP Sunan Giri, SMPN 2 Gresik, SMPN 4 Gresik, SMP Sunan Ampel, SMP PGRI Kedamean dan SMP YPM 5 di Gresik yang telah

mengizinkan Penulis untuk melakukan penelitian di sekolah serta Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

6. Orang tua dan kakak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil.
7. Istri dan anakku tersayang yang telah memberikan motivasi yang sangat kuat untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Pimpinan beserta staf Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih belum sempurna oleh karena itu saran dan masukan yang membangun sangat ditunggu.

Depok, Juli 2012

Penulis,



Andi Andangatmadja

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Andangatmadja

NPM : 0906589002

Program Studi : Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan

Departemen : Ilmu Administrasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik, Jawa Timur

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada tanggal: Juli 2012

Yang menyatakan



(Andi Andangatmadja)

ABSTRAK

Nama : Andi Andangatmadja
Program Studi : Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan
Judul : Analisis Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik

Penelitian ini bertujuan menganalisis Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik Jawa Timur melalui konsep Stewart dan Ellwood; yang memuat tujuh dimensi yaitu; (1) *Intentions Disclosure*, (2) *Directing Mind Visibility*, (3) *Performance Visibility*, (4) *Answering for Precaution Taken*, (5) *Accountability for Probity and Legality*; (6) *Process Accountability*; dan (7) *Program Accountability*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Responden yang terlibat dalam penelitian adalah seluruh panitia pembangunan sekolah sebanyak 52 orang di Kabupaten Gresik Jawa Timur, dan Instrumen yang digunakan untuk menilai ketujuh dimensi tersebut melalui pengamatan, wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menggambarkan bahwa ketujuh dimensi menunjukkan hal yang positif, sehingga Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik Jawa Timur dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Kata Kunci: Akuntabilitas

ABSTRACT

Name : Andi Andangatmadja
Study Program : Special Aspects of Administration and Education Policy
Title : Analysis of Accountability at The Building Science-laboratory-
Room Grant Program for Junior High Schools in Gresik District

The objective of this study is to Analysis Accountability Building of Science Laboratory Program at Junior High School in Gresik Distric East Java about Stewart and Ellwood concept, loaded seven dimensions; (1) *Intentions Disclosure*, (2) *Directing Mind Visibility*, (3) *Performance Visibility*, (4) *Answering for Precaution Taken*, (5) *Accountability for Probity and Legality*; (6) *Process Accountability*; dan (7) *Program Accountability*. The Method of this research is a quntitative approach. Respondent in the research is building committee element about 52 persons and Instrument this research approach is observation, interview dan instrument non-test. Result show that seven dimensions is explain that positive things, so Analysis Accountability Building of Science Laboratory Program at Junior High School in Gresik Distric East Java, that used it

Key words: Accountability

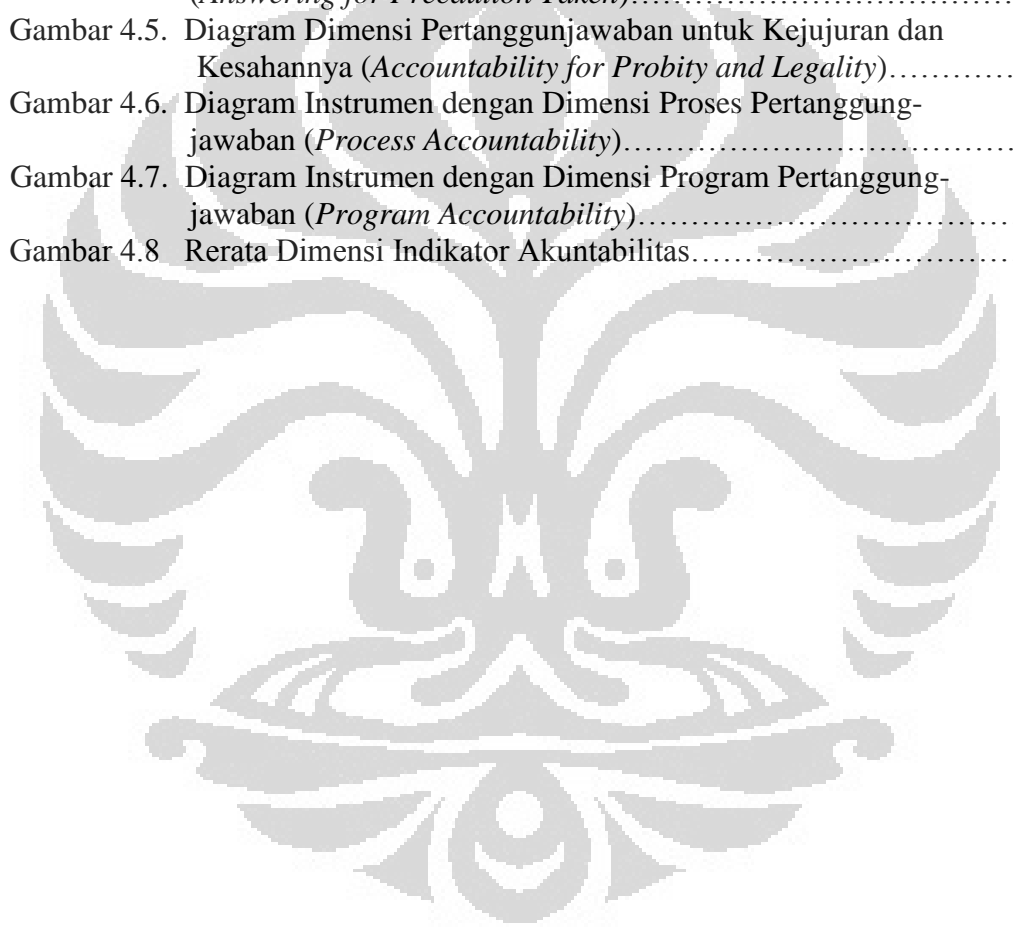
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Signifikansi Penelitian.....	14
1.5. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Penelitian Terdahulu.....	16
2.2. Pengertian Akuntabilitas.....	17
2.3. Tipe-tipe Akuntabilitas.....	29
2.4. Prinsip-prinsip Akuntabilitas.....	33
2.5. Partisipasi dalam Pembangunan.....	37
2.6. Transparansi dalam Pembangunan.....	41
2.7. Operasional Variabel dan Indikator.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	49
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.3. Teknik Pengolahan Data.....	54
3.4. Teknik Analisis Uji Coba Instrumen.....	58
3.5. Keterbatasan Penelitian.....	61
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
4.1. Pembahasan Umum Hasil Penelitian.....	63
4.2. Analisis Data dan Pembahasan Masalah.....	64
4.2.1. Pengukuran Akuntabilitas melalui Dimensi Pengungkapan Tujuan (<i>Intentions Disclosure</i>).....	65
4.2.2. Pengukuran Akuntabilitas melalui Dimensi Kemampuan	

Mengarahkan Pikiran yang Jelas (<i>Directing Mind Visibility</i>).....	67
4.2.3. Pengukuran Akuntabilitas melalui Dimensi Unjuk Kerja Nyata (<i>Performance Visibility</i>).....	70
4.2.4. Pengukuran Akuntabilitas melalui Dimensi Menjawab Tindakan Pencegahan (<i>Answering for Precaution Taken</i>).....	72
4.2.5. Pengukuran Akuntabilitas melalui Dimensi Pertanggungjawaban untuk Kejujuran dan Kesahannya (<i>Accountability for Probity and Legality</i>).....	75
4.2.6. Pengukuran Akuntabilitas melalui Dimensi Proses Pertanggungjawaban (<i>Process Accountability</i>).....	78
4.2.7. Pengukuran Akuntabilitas melalui Dimensi Program Pertanggungjawaban (<i>Program Accountability</i>).....	81
4.2.8. Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA.....	84
4.3. Analisis Hasil Wawancara.....	87
4.4. Akuntabilitas Pembangunan Ruang Lab. IPA SMP.....	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	94
5.2. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Hasil Moneyv.....	10
Gambar 4.1. Diagram Dimensi Pengungkapan Tujuan(<i>Intentions Disclosure</i>).....	67
Gambar 4.2. Diagram Dimensi Kemampuan Mengarahkan Pikiran yang Jelas (<i>Directing Mind Visibility</i>).....	69
Gambar 4.3. Diagram Dimensi Unjuk Kerja Nyata (<i>Performance Visibility</i>).....	72
Gambar 4.4 Diagram Dimensi Menjawab Tindakan Pencegahan (<i>Answering for Precaution Taken</i>).....	74
Gambar 4.5. Diagram Dimensi Pertanggungjawaban untuk Kejujuran dan Kesahannya (<i>Accountability for Probitiy and Legality</i>).....	78
Gambar 4.6. Diagram Instrumen dengan Dimensi Proses Pertanggung- jawaban (<i>Process Accountability</i>).....	81
Gambar 4.7. Diagram Instrumen dengan Dimensi Program Pertanggung- jawaban (<i>Program Accountability</i>).....	84
Gambar 4.8 Rerata Dimensi Indikator Akuntabilitas.....	86

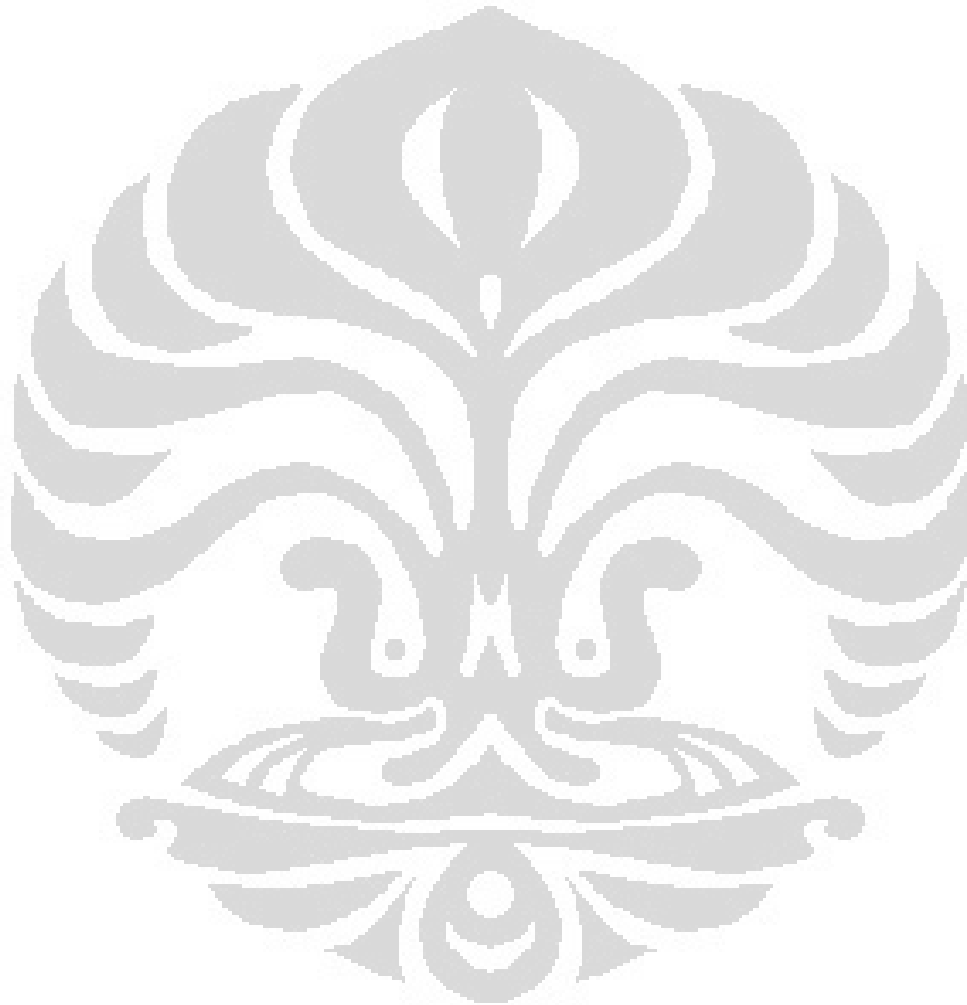


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pengadaan Ruang Lab. IPA.....	8
Tabel 1.2	Daftar 10 Provinsi terbanyak yang mendapat Subsidi.....	9
Tabel 1.3	Data Keterlaksanaan Pembangunan Lab. IPA di Jawa Timur.....	12
Tabel 2.1	Indikator Pencapaian Akuntabilitas.....	47
Tabel 3.1	Interpretasi Persentase Kemampuan pengelolaan dana swakelola pembangunan ruang laboratorium IPA SMP.....	57
Tabel 3.2	Interpretasi Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Dana Swakelola Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP.....	58
Tabel 3.3	Interpretasi Validitas Instrumen	59
Tabel 3.4	Interpretasi Reliabilitas	61
Tabel 4.1	Nilai Rerata Dimensi Pengungkapan Tujuan(<i>Intentions Disclosure</i>).....	65
Tabel 4.2	Nilai Rerata Dimensi Kemampuan Mengarahkan Pikiran yang Jelas (<i>Directing Mind Visibility</i>).....	68
Tabel 4.3	Nilai Rerata Dimensi Unjuk Kerja Nyata (<i>Performance Visibility</i>).....	71
Tabel 4.4	Nilai Rerata Dimensi <i>Menjawab Tindakan Pencegahan</i> (<i>Answering for Precaution Taken</i>).....	74
Tabel 4.5	Nilai Rerata Indikator Dimensi Pertanggungjawaban untuk Kejujuran dan Kesahannya (<i>Accountability for Probity and Legality</i>)....	77
Tabel 4.6	Nilai Rerata Dimensi Proses Pertanggungjawaban (<i>Process Accountability</i>).....	80
Tabel 4.7	Nilai Rerata Dimensi Program Pertanggungjawaban (<i>Program Accountability</i>).....	83
Tabel 4.8	Nilai Rerata Dimensi Indikator Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Instrumen Peneliiian.....	102
Lampiran 2	Hasil Ujicoba Instrumen.....	116



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pendidikan tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem kehidupan umat manusia. Artinya, sistem pendidikan merupakan bagian integral dalam keseluruhan sistem kehidupan, dan berperan krusial serta strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Dalam konteks nasional, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia telah memasuki babakan baru, yakni reformasi atau pembaharuan tatanan yang ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa agar dapat sejajar dan mampu bersaing dalam percaturan kehidupan dengan bangsa lain. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi; atau berbagai kompetensi yang berdaya dan berhasilguna demi membangun diri dan bangsa.

Di samping telah memasuki tatanan reformasi, bangsa Indonesia juga tidak dapat mengelak dari derasnya arus globalisasi yang berdampak terhadap berbagai dimensi kehidupan. Dalam masyarakat global, manusia hidup di antara manusia lain yang bertekad kuat untuk berdaya-saing tinggi. Bangsa Indonesia dalam masyarakat global harus berkompetisi dalam standar dan pasar internasional, bukan hanya dalam produk materi, melainkan dalam pikiran dan gagasan.

Salah satu usaha untuk mengantisipasi berbagai perubahan akibat globalisasi dan reformasi adalah pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang prospektif, yakni pendidikan yang terfokus kepada pencapaian suatu masyarakat yang belajar sepanjang hayat.

Dalam fokus pendidikan yang seperti itu terkandung implikasi, bahwa upaya pendidikan bukan hanya menyiapkan manusia untuk menguasai pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja pada saat kini; melainkan manusia yang mampu, sanggup, dan mau belajar sepanjang hidupnya. Dengan kata lain, belajar bukan sekadar aktivitas formal yang dibatasi oleh

dinding kelas; tetapi belajar sebagai visi, misi dan strategi atau ruh aktivitas kehidupan manusia sehari-hari yang berhadapan dengan lingkungan yang selalu berubah.

Persekolahan sebagai sub sistem pendidikan dalam masyarakat kini dan ke depan tidak dapat melepaskan tanggung jawab dalam menjawab tatanan dunia yang selalu berubah. Artinya visi, misi dan strategi sistem persekolahan mesti mempedulikan penyiapan masyarakat belajar sepanjang hayat. Dalam skala mikro, sistem persekolahan dapat menerjemahkan fokus pendidikan tersebut ke dalam lingkup yang berhadapan langsung dengan peserta didik (individu).

Jalan yang dapat ditempuh oleh persekolahan yang prospektif antara lain merevisi dan merekonseptualisasi sekaligus mereaktualisasi secara terpadu atas berbagai piranti lunak dan piranti keras yang menunjang proses pendidikan yang tengah berlangsung. Unsur masukan yang tadinya dipandang seragam, mesti beralih ke masukan yang beragam, baik dalam tataran konsep maupun praksis. Artinya, sistem persekolahan mesti menghormati dan mengapresiasi bahwa individu yang menjadi subjek pendidikan beragam karakteristik dan berbagai latar belakang dirinya. Keragaman individu itu merupakan modal dasar yang perlu diberdayakan melalui praksis pendidikan, hingga mereka mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan menjadi pribadi yang khas dalam mengaktualisasikan kompetensinya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan *ilmu pengetahuan* dan *teknologi*. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah. Salah satu upaya peningkatan Sumber Daya Manusia yang terstruktur, sistimatis, dan terukur adalah melalui pendidikan.

Proses globalisasi yang menerpa dunia pendidikan, membawa dampak yang amat signifikan yang mempengaruhi kehidupan dunia pendidikan itu sendiri. Untuk menghadapi berbagai dampak tersebut, dunia pendidikan harus mereview dan menilai ulang dengan sungguh-sungguh seluruh unsur yang ada didalamnya. Apakah seluruh unsur dalam dunia pendidikan itu memiliki kemampuan untuk memberikan respon yang diharapkan atautkah lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk merespon terhadap terpaan globalisasi tersebut.

Kuatnya tuntutan globalisasi membuat pendidikan harus mengubah dan meninggalkan paradigma lama dan mengganti dengan paradigma baru karena Pendidikan tidak terpisahkan dari keseluruhan kehidupan manusia dan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan kehidupan manusia serta berperan penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia karena terkandung implikasi bahwa upaya pendidikan bukan hanya menyiapkan manusia untuk menguasai pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja pada saat ini, melainkan manusia yang mampu, sanggup, dan mau belajar sepanjang hidupnya. Dengan kata lain, belajar bukan sekadar aktivitas formal yang dibatasi oleh dinding kelas; tetapi belajar sebagai visi, misi dan strategi atau ruh aktivitas kehidupan manusia sehari-hari yang berhadapan dengan lingkungan yang selalu berubah.

Kondisi demikian mempunyai arti, bahwa pendidikan yang akan dapat bersaing dalam era masyarakat globalisasi harus mampu mencapai tingkat mutu yang optimal, bukan hanya mutu produk pendidikan, tetapi juga mutu proses, mutu sumber daya manusia (tenaga pendidik dan kependidikan), promosi yang efektif (bermutu), sehingga mampu memikat pasar yang akhirnya akan meningkatkan jumlah peminat, termasuk juga mutu sistem administrasi yang mampu melayani siapapun secara professional dan tepat waktu sesuai yang dikehendaki oleh pelanggan, serta mutu staf sehingga mampu melayani pelanggan dengan memuaskan. Inilah yang dimaksud mutu terpadu secara menyeluruh (*total quality*).

Dengan kata lain, dewasa ini dalam era global terdapat hubungan yang erat dan tidak dapat dipungkiri antara mutu produk pendidikan, kepuasan pelanggan, dan keuntungan lembaga penyelenggara pendidikan. Makin tinggi mutu suatu produk pendidikannya, makin tinggi pula kepuasan pelanggan dan pada waktu yang bersamaan harga menjadi tidak bermasalah bagi pelanggan tersebut. Oleh karena itu program perbaikan mutu bertujuan menaikkan tingkat kepuasan semua pihak yang terlibat dalam pengembangan pendidikan tersebut. Dari penelitian membuktikan ada korelasi yang kuat antara mutu, kepuasan pelanggan, dengan keuntungan yang dapat diraih oleh lembaga pendidikan.

International Institute for Management Development (2001), suatu organisasi internasional yang bermarkas di Kota Lausanne, Swiss, menyajikan informasi tentang peringkat daya saing ekonomi sejumlah negara. Dari sebanyak 49 negara, ternyata Indonesia berada pada posisi paling rendah; yaitu peringkat ke-49. Negara-negara tetangga seperti Australia, Selandia Baru, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Korea Selatan memiliki peringkat di atas Indonesia. Artinya daya saing ekonomi kita memang paling lemah di antara negara-negara dunia pada umumnya, termasuk negara-negara tetangga

Hal ini dapat diduga rendahnya daya saing tersebut terkait kemampuan sumberdaya manusianya. Dibanding dengan tahun 2001 derajad daya saing Indonesia pada tahun 2005 tidak berubah signifikan. Menurut hasil survei *International Institute for Management Development*, Indonesia pada tahun 2005 terpuruk pada peringkat ke-60 dari 61 negara.

Sementara itu dalam hal pendidikan kondisinya juga sama. Studi *Political and Economical Risk Consultancy* (2001), menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Seperti diketahui tingkat **pendidikan (SDM)** angkatan kerja Indonesia didominasi oleh pendidikan dasar yaitu sekitar 63%. Dalam hal ini Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina, lagi-lagi berada di atas kita. Kondisi demikian diperkuat dengan data dari laporan UNDP, *United Nations Development Programme*, dalam “*Human Development Report 2005*” tentang kualitas pembangunan manusia. Dari 177 negara, Indonesia berada

pada peringkat ke-110. Sementara Singapura mencapai peringkat ke-25, Brunei Darussalam ke-33, Malaysia ke-61, Thailand ke-73, dan Filipina ke-84.

Sementara itu Pemerintah terus berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemerataan layanan pendidikan. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah program pembangunan dibidang pendidikan yaitu peningkatan mutu, percepatan akses serta memperkuat daya saing pendidikan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; serta pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Belajar dari pengalaman negara-negara industri baru (*new emerging industrialized countries*) di Asia Timur, yang menunjukkan bahwa pembangunan suatu bangsa memerlukan *critical mass*, yaitu ketersediaan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai modal dasar pendukung pembangunan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu mengupayakan secara sungguh-sungguh agar manusia Indonesia memiliki tingkat pendidikan dengan mutu yang baik agar *critical mass* yang dimaksud terpenuhi. Sejalan dengan pemikiran tersebut maka Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar telah menetapkan beberapa rencana strategis jangka menengah, melalui program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, yaitu: memenuhi ketersediaan, keterjangkauan, kualitas (mutu), kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan. Program pembangunan pendidikan di Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (Direktorat PSMP) pada tahun anggaran 2010 diprioritaskan pada peningkatan mutu SMP dan pematapan penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan Tahun, yang merupakan salah satu langkah strategis untuk membentuk *critical mass* tersebut.

Walaupun pada tahun 2008 pemenuhan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sudah cukup tinggi (96,18%) ditinjau dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB. Namun demikian Pemerintah masih berkepentingan

untuk menjamin keterlaksanaan pendidikan dasar yang bermutu dan merata di seluruh Indonesia.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah peningkatan mutu proses pembelajaran IPA, dan salah satu faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran IPA itu sendiri adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar-mengajarnya. Itulah sebabnya pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan program bantuan pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebagai tempat untuk melakukan eksperimen atau percobaan pada proses pembelajaran IPA, program bantuan (*block grant*) pembangunan ruang laboratorium IPA ini menggunakan dana dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan sejak tahun 2004 sampai dengan 2010.

Kebutuhan ruang belajar dan ruang belajar lain, terutama ruang laboratorium IPA yang sesuai dengan standar Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah Menengah Pertama khususnya bagi sekolah bertaraf internasional (SBI), sekolah standar nasional (SSN) dan sekolah rintisan SSN mendesak untuk segera dituntaskan. Hal tersebut terbukti bahwa menurut data Kementerian Pendidikan Nasional, hingga tahun 2008 tercatat sebanyak 200 sekolah bertaraf internasional (SBI), 2.232 sekolah standar nasional (SSN) dan 3.079 sekolah potensial SSN yang diindikasikan belum memiliki keseimbangan antara rasio sekolah-laboratorium dan kesesuaian dengan standar Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Program pembangunan ruang laboratorium IPA diberikan dalam bentuk bantuan kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta yang memenuhi kriteria dan melalui mekanisme seleksi, sedangkan pengelolaan dan pelaksanaan bantuan pembangunannya dilakukan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan program manajemen berbasis sekolah (MBS) yaitu meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan nasional yang bermutu

melalui pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka mensukseskan pemantapan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Program ini disebut sebagai program bantuan pembangunan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan mekanisme swakelola dan partisipasi masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan keputusan melalui Menteri Pendidikan Nasional tentang pemberian bantuan *block grant* bagi pendidikan dasar dan menengah sebagai acuan dalam pelaksanaan program baik di tingkat pusat maupun sekolah, yang kemudian secara teknis pelaksanaan *block grant* tersebut diatur lebih lanjut melalui pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan persyaratan umum bagi sekolah yang akan mengajukan bantuan *block grant* adalah sanggup menyediakan faktor pendamping berupa dana atau sumber daya lain.

Program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP dengan mekanisme swakelola dan partisipasi masyarakat merupakan salah satu turunan dari kebijakan pemerintah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP dilakukan oleh sekolah dengan membentuk panitia pembangunan sekolah (P2S) yang melibatkan kepala sekolah, guru-guru dan komite sekolah sebagai wakil dari orang tua/wali siswa. P2S dibentuk sekolah dengan tujuan agar ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Pada Tabel 1.1 menggambarkan jumlah ruang laboratorium IPA yang sudah berhasil dibangun oleh Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Tampak dalam Tabel 1.1 tersebut bahwa setiap tahun program Pembangunan ruang laboratorium IPA terus meningkat jumlahnya kecuali pada tahun 2009, ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan IPA karena mata pelajaran IPA di SMP merupakan salah satu mata pelajaran penting. Pembangunan ruang laboratorium IPA masih akan terus dikembangkan untuk tahun-tahun berikutnya.

Tabel 1.1
Pengadaan Ruang Laboratorium IPA di seluruh Indonesia

Nomor	Tahun	Ruang Laboratorium IPA
1	2004	282
2	2005	565
3	2006	724
4	2007	910
5	2008	3.273
6	2009	868
	Jumlah	6.622

Sumber : SMP dalam angka, Direktorat Pembinaan SMP (Tahun 2010)

Proses pembangunan dibidang pendidikan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, maka program ini diberikan kepada seluruh SMP di 33 provinsi secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan pemerintah. Rekapitulasi program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA-SMP dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan Nasional pada 10 provinsi dengan jumlah terbanyak ditunjukkan dalam Tabel 1.2.

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerima bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP terbanyak berada pada 3 provinsi di pulau Jawa yaitu adalah provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Dalam Pembangunan Laboratorium IPA tersebut terdapat permasalahan dan hambatan, karena jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA tersebut lebih banyak di ketiga provinsi tersebut maka dalam mempelajari dan mencermati hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP dapat dari ketiga provinsi tersebut, mengingat diantara ketiga provinsi ini juga mempunyai jumlah kabupaten/kota yang cukup besar.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMP seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1.1 dinamika permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ruang laboratorium IPA di Provinsi Jawa Timur sangat bervariasi, disamping itu jumlah sekolah yang menerima bantuan ruang laboratorium IPA SMP juga cukup banyak. Dengan demikian dinamika

permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP, provinsi Jawa Timur dapat mewakili permasalahan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP.

Tabel 1.2

Daftar 10 Provinsi Terbanyak yang Mendapat Subdisi Lab. IPA

No.	PROVINSI	TAHUN							TOTAL
		2004	2005	2006	2007	2008	2009 (APBN)	2009 (LOAN)	
1	Jawa Tengah	15	77	75	159	606	110	-	1042
2	Jawa Barat	17	79	110	125	616	186	-	1133
3	Jawa Timur	19	58	86	145	648	69	-	1025
4	Sulawesi Sel.	27	39	39	46	125	1	76	353
5	Sumatera Utara	9	30	55	32	171	5	-	302
6	Lampung	1	16	17	42	129	33	-	238
7	NTT	18	13	7	9	60	4	86	197
8	Sulawesi Utara	10	8	23	22	72	3	45	183
9	Sumatera Sel.	5	12	33	19	108	1	-	178
10	Sumatera Barat	13	12	26	13	77	33	-	174

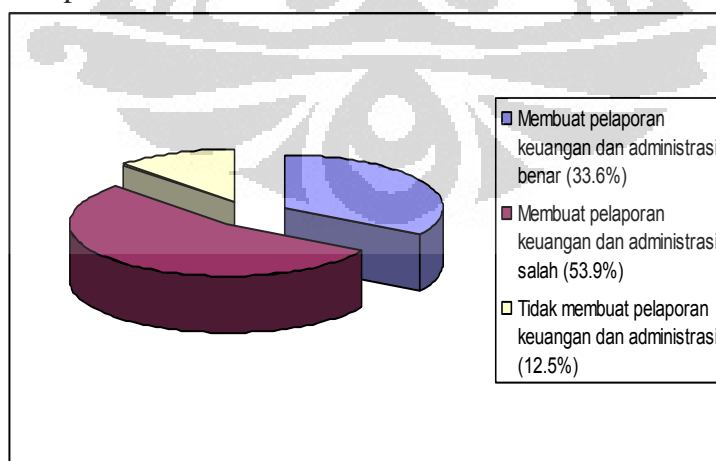
Sumber : Rakapitulasi Pembangunan Ruang Lab. IPA Tahun 2004-2009 Direktorat Pembinaan SMP (2010)

Semakin banyak jumlah sekolah yang menerima bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA maka karakteristik permasalahannya dapat digambarkan melalui sebaran sekolah yang cukup banyak dan cukup beragam, walaupun belum mewakili secara nasional, karena kemampuan sekolah dan letak geografis yang berbeda. Dari sejumlah permasalahan pembangunan ruang laboratorium IPA, permasalahan yang merata terjadi di banyak sekolah adalah permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas.

Perkembangan dari tahun ke tahun pola swakelola dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan mempunyai dampak positif dan negatif. Pola tersebut dapat mempengaruhi kinerja unsur-unsur sekolah meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru-guru serta masyarakat atau komite sekolah yang terlibat dalam menjalankan tugas sebagai pengajar dan juga sebagai pengelola dana bantuan dari pemerintah pusat. Pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan administrasi sesuai yang diminta oleh Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMP meliputi:

- a. Pelaporan penerimaan dana (keuangan) yang telah ditransfer oleh Direktorat Pembinaan SMP ke sekolah penerima.
- b. Pembuatan pembukuan yaitu Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, dan Buku Bank.
- c. Pelaporan penyelesaian pembangunan laboratorium IPA secara fisik dan keuangan.
- d. Dokumentasi keuangan berupa kwitansi pembelian barang, bermaterai sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMP, Pelaksanaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP di lapangan tidak selalu berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan. Monitoring dan Evaluasi berkaitan dengan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA, Ruang Kelas Baru dan Ruang Belajar Lain yang dilakukan tahun 2008, ditemukan beberapa persoalan atau permasalahan yang tidak sesuai dengan Buku Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis pembangunan fisik yang diterbitkan pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMP, terutama masalah akuntabilitas, yaitu pembuatan pelaporan keuangan dan administrasi tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) sehingga akuntabilitas pelaporan tersebut rendah ditunjukkan pada Gambar-1.1



Sumber : Laporan Monev program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP Direktorat Pembinaan SMP (2008)

Gambar-1.1. Data Hasil Monev Program Pembangunan Laboratorium IPA tahun 2008

Hal tersebut menunjukkan bahwa memang terdapat hambatan dan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan ruang laboratorium IPA, khususnya masih kurang dalam akuntabilitasnya terutama pada pelaporan dan administrasi keuangan. Sedangkan dalam pengelolaan anggaran Negara melalui dana bantuan ke sekolah dibutuhkan kejujuran dan tanggung jawab, yang mana tanggung jawab stakeholder sudah merupakan keharusan. Karena dana yang dikelola oleh sekolah merupakan dana yang dihimpun dari rakyat sebagai stakeholder utama, dan diserahkan tanggung jawab pengelolaannya kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara yang kemudian disalurkan ke sekolah yang membutuhkan melalui Kementerian Pendidikan Nasional khususnya Direktorat Pembinaan SMP melalui mekanisme swakelola.

Permasalahan yang muncul merupakan data faktual yang ditemukan di lapangan sebagai penelitian awal yang dilakukan penulis dalam akuntabilitas program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah masih minimnya sifat laporan administrasi pelaksanaan bantuan *blockgrant*, terutama yang berkaitan dengan masalah pelaporan keuangan, serta belum adanya laporan yang dipublikasikan kepada pihak terkait seperti; stakeholder, masyarakat sekitar, maupun kepada panitia yang dibentuk

Mengacu Instruksi Presiden Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka menarik untuk dikaji sejauh mana pelaksanaan pengelolaan anggaran negara di sekolah penerima bantuan program pembangunan Ruang Laboratorium IPA. Suatu kinerja individu atau organisasi disebut akuntabel apabila individu atau organisasi tersebut telah memenuhi kriteria akuntabilitas, dimana dalam akuntabilitas itu terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan seluruh kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi dari atau yang berkepentingan.

Berdasarkan beberapa fakta yang telah dikemukakan sebelumnya maka permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini adalah permasalahan akuntabilitas pembangunan ruang laboratorium IPA SMP di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Gresik provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 masih menerima bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA yang sama dengan tahun 2008 dan tidak

memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan SMP tahun anggaran 2010. Data hasil monitoring juga menunjukkan nilai keterlaksanaan pembangunan ruang laboratorium IPA, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik memiliki nilai rata-rata keterlaksanaan pembangunan ruang laboratorium IPA terendah yaitu sebesar 69,849. Nilai tersebut terdiri atas beberapa komponen yang mempengaruhinya, hal ini dapat dilihat seperti pada Tabel 1.3. di bawah ini.

Tabel 1.3
Data keterlaksanaan pembangunan ruang laboratorium IPA Jawa Timur
Tahun 2008

No	Kabupaten/Kota	Eligibilitas	Akuntabilitas	Transparansi	Kualitas	Partisipasi Masyarakat	Rata-2 Kab/Kota
1	Kab. Bangkalan	99.661	82.385	81.29	36.087	91.02	78.089
2	Kab. Banyuwangi	85.774	78.077	77.487	76.359	80.882	79.716
3	Kab. Blitar	95.698	95.824	92.627	80.124	98.319	92.518
4	Kab. Bojonegoro	92.569	88.413	87.03	73.641	92.279	86.786
5	Kab. Bondowoso	96.836	92.788	96.774	99.457	89.706	95.112
6	Kab. Gresik	91.102	77.981	72.043	47.826	60.294	69.849
7	Kab. Jember	91.423	77.495	74.009	71.429	73.782	77.628
8	Kab. Jombang	91.738	75.846	69.462	65.652	84.118	77.363
9	Kab. Kediri	92.27	76.331	72.953	64.214	69.683	75.090
10	Kab. Lamongan	89.675	76.818	77.72	44.399	90.441	75.811
11	Kab. Lumajang	95.21	72.735	65.711	71.981	70.915	75.310
12	Kab. Madiun	93.593	93.593	93.593	93.593	93.593	93.593
13	Kab. Magetan	94.274	91.111	91.398	50.242	97.386	84.882
14	Kab. Malang	93.892	81.538	79.122	73.007	74.02	80.316
15	Kab. Mojokerto	92.412	82.115	75.941	71.739	79.779	80.397
16	Kab. Nganjuk	95.91	89.846	88.28	81.739	82.941	87.743
17	Kab. Ngawi	96.439	90.118	90.102	49.827	98.319	84.961
18	Kab. Pacitan	94.731	93.846	88.575	91.304	94.853	92.662
19	Kab. Pamekasan	94.548	90.808	89.409	31.957	83.235	77.991
20	Kab. Pasuruan	95.057	88.846	87.204	79.13	61.176	82.283
21	Kab. Ponorogo	91.711	90.513	83.423	76.449	87.745	85.968
22	Kab. Probolinggo	93.748	88.407	86.406	86.957	88.235	88.751
23	Kab. Sampang	89.547	60.598	56.989	73.913	70.588	70.327
24	Kab. Sidoarjo	92.162	91.259	84.555	88.142	86.631	88.550
25	Kab. Situbondo	95.786	94.029	99.194	94.538	96.078	95.925
26	Kab. Sumenep	94.436	94.308	97.634	69.565	88.235	88.836
27	Kab. Trenggalek	90.985	74.701	69.654	57.971	91.503	76.963
28	Kab. Tuban	91.589	92.012	87.593	64.883	96.38	86.491
29	Kab. Tulungagung	94.607	79.179	77.419	68.406	92.157	82.354

No	Kabupaten/Kota	Eligibilitas	Akuntabilitas	Transparansi	Kualitas	Partisipasi Masyarakat	Rata-2 Kab/Kota
30	Kota Batu	86.327	86.058	85.081	64.13	80.147	80.349
31	Kota Blitar	98.305	93.846	87.097	82.609	100	92.371
32	Kota Kediri	99.479	98.718	93.907	86.957	80.392	91.891
33	Kota Madiun	94.664	76.154	69.892	75	80.882	79.318
34	Kota Malang	94.194	81.846	78.28	82.319	77.255	82.779
35	Kota Mojokerto	96.292	83.077	78.853	63.043	95.098	83.273
36	Kota Pasuruan	95.48	86.645	84.926	49.296	52.941	73.858
37	Kota Probolinggo	96.402	77.692	71.685	63.768	80.392	77.988
38	Kota Surabaya	93.485	87.308	85.484	60.87	47.059	74.841

Sumber : laporan akhir Program Pembangunan laboratorium IPA, Ruang Kelas Baru dan Ruang Belajar Lain , Provinsi JawaTimur Tahun 2008

Mencermati data yang dikemukakan dalam Tabel 1.3 maka fokus kajian permasalahan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP difokuskan di Kabupaten Gresik dengan judul: Analisis akuntabilitas program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik Jawa Timur.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah yaitu: “*Akuntabilitas pengelolaan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP*”, yang secara lebih rinci permasalahan tersebut dinyatakan sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pelaksanaan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta menjalankan petunjuk pelaksanaan dan teknis pembangunan Ruang Laboratorium IPA yang berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan di Kabupaten Gresik, sehingga dapat diketahui apakah telah memahami peraturan dan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis dalam rangka mewujudkan akuntabilitas. Sedangkan tujuan penelitian yang lebih rinci sesuai dengan pertanyaan penelitian, adalah: Untuk mengetahui bagaimana

prinsip akuntabilitas sudah dijalankan oleh SMP baik negeri maupun swasta dalam melaksanakan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

1.4. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai investasi akademik berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi, berkaitan dengan kebijakan publik, khususnya mengenai pengelolaan dana bantuan di sekolah. selain dari itu temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran yang realistis sesuai dengan prinsip ilmu keuangan negara, serta perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dana pemerintah dengan mekanisme swakelola.

Manfaat bagi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan Nasional, temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi umpan balik, untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dana bantuan pada pembangunan ruang laboratorium IPA SMP dan pembangunan-pembangunan ruang-ruang lain. Penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan atau keputusan yang dapat bermanfaat pada program berikutnya.

Kinerja sekolah dalam melaksanakan pembangunan ruang laboratorium IPA meliputi aspek-aspek antara lain elibilitas, akuntabilitas, transparansi, kualitas produk, dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, penilaian ini hanya menyangkut akuntabilitas. Dengan demikian penelitian ini bermaksud menganalisis akuntabilitas program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA yang berasal dari dana bantuan pemerintah pusat melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun anggaran 2010 baik SMP negeri maupun swasta di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis dibagi secara sistematis dalam 5 (lima) Bab, yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi uraian tentang kerangka pemikiran yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Literatur

Membahas teori-teori tentang pengertian akuntabilitas, tipe akuntabilitas, Prinsip-prinsip didalam akuntabilitas, Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Transparansi pembangunan dan Operasional dan indikator.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini dikemukakan tentang bagaimana penelitian dilakukan, memuat metode penelitian, rancangan penelitian yang dilakukan, tahapan-tahapan penelitian, subjek yang diteliti, instrumen penelitian dan bagaimana hasil penelitian yang diperoleh tersebut akan dianalisis.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan Masalah

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum sumber data dan sistematika pembahasan, Analisa data dan pembahasan hasil penelitian, dan temuan-temuan penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan hasil penelitian yaitu berupa resume dari pembahasan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, selanjutnya diajukan saran-saran berdasarkan kesimpulan yang dibuat.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa studi yang relevan terkait dengan permasalahan Akuntabilitas antara lain dilakukan oleh Subroto (2009), penelitian tersebut memfokuskan perhatian pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian tersebut dikembangkan karena Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapan dari pengembangan penelitian tersebut hasilnya dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung, khususnya Kecamatan Tlogomulyo dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Memperkuat kedudukan penelitian ini terhadap penelitian lain tentang akuntabilitas dapat dikemukakan beberapa penelitian, antara lain sebagai berikut: *Pertama*, hasil yang dilakukan Subroto (2009) tersebut menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Boy dan Hotniar (2009), penelitian tersebut dikembangkan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan di SMA Negeri kota Depok, Jawa Barat. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sikap akuntabel dan transparan satuan

pendidikan dalam pengelolaan APBS jika dilakukan baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Jika dibandingkan antara sikap akuntabilitas dan transparansi, pengaruh akuntabilitas lebih kuat dibandingkan pengaruh transparansi terhadap partisipasi orang tua murid. Semakin akurat dan tepat waktu pelaporan penggunaan dana yang dikumpulkan dari orang tua murid, maka akan semakin tinggi partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

Dengan demikian mengacu pada kedua penelitian tersebut, maka penelitian ini dikembangkan untuk mengetahui akuntabilitas sekolah dalam pelaksanaan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP di Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur. Akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini menyangkut komponen-komponen yang dikembangkan oleh Stewart dan Elwood, sehingga penelitian ini akan memperkaya khasanah penelitian tentang akuntabilitas di Indonesia.

2.2. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang dikenal di dalam organisasi pelayanan publik, di mana masih diminati di dalam kompleksitas, sejarah dan implikasi-implikasinya. Akuntabilitas mempunyai arti mengurus dan mengaudit, melakukan tanggung jawab, laporan kinerja, menjawab atas perilaku atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan, keputusan dan tindakan, terbuka bagi pemeriksaan dan peradilan, bagian dari sanksi dan penghargaan (Hinton dan Wilson 1993:123)

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik (Supriyono, 2001:23). Manajemen suatu organisasi dapat dikatakan sudah akuntabel menurut Supriyono (2001:23) apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah memenuhi persyaratan: (1) menentukan tujuan yang tepat, (2) mengembangkan standar yang dibutuhkan

untuk pencapaian tujuan, (3) secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar, (4) mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.

Akuntabilitas menuntut 2 (dua) hal yaitu (Miriam Budiarjo, 1998:120): (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*). Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumberdaya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumberdaya tersebut.

Muara dari akuntabilitas adalah peningkatan kinerja. Oleh karenanya, hasil dari penerapan akuntabilitas tidak hanya menjadikan seseorang menjadi akuntabel bagi pihak lain, tetapi lebih dari itu dapat meningkatkan kinerja seseorang yang pada gilirannya kemudian sangat mempengaruhi peningkatan kinerja organisasi. Dalam praktek penerapan akuntabilitas, seseorang yang akuntabel akan selalu berusaha menunjukkan kinerja yang tinggi agar dapat diterima dengan baik

Suatu kinerja individu atau organisasi disebut akuntabel apabila individu atau organisasi tersebut telah memenuhi kriteria akuntabilitas, dimana dalam akuntabilitas itu terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan seluruh kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi dari atau yang berkepentingan. Senada dengan yang diutarakan oleh Shafritz dan Russel (1997:376), bahwa:

Accountability is the extent to which one must answer to higher authority – legal or organizational – for one’s actions in society at large or within one’s particularly organizational position.

Disebutkan akuntabilitas merupakan keharusan memberikan jawaban kepada otoritas tertinggi, baik itu otoritas hukum maupun otoritas organisasi, untuk kegiatan-kegiatan di dalam masyarakat luas atau terutama pada posisi organisasional. Lebih lanjut Shafritz dan Russel mengatakan sebagai berikut:

Thus the challenge of accountability is to find a balance between complete trusting government officials to use their best professional judgement in the public’s interest and watching them so closely through legislative

committee or executive review agencies that it inhibits their ability to function.

Tantangan akuntabilitas adalah untuk menemukan keseimbangan yang sempurna antara pejabat Pemerintah yang dipercaya untuk menggunakan kebebasan membuat pertimbangan profesional terbaik mereka bagi kepentingan publik dan mengawasi mereka secara ketat melalui komisi legislatif atau perwakilan pengkajian eksekutif (di Indonesia lembaga resmi yang independen seperti ini belum ada, kecuali lembaga swadaya masyarakat) yang mana hal itu akan merintang kemampuan mereka untuk bekerja. Karena kita mencita-citakan sebuah bentuk Pemerintahan yang demokratis, kita membutuhkan pertimbangan bagaimana menghubungkan antara Pemerintah yang demokratis dengan kegiatan administrasi publik.

Menurut Peters (2000:7) dalam *“The Politics of Bureaucracy”* menyatakan:

“The requirement of an public organization (or perhaps an individual) To render an account to some other organization and to explain its action”

Berdasarkan uraian definisi akuntabilitas di atas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban seseorang untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatannya kepada pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi atau atasannya. Makna akuntabilitas yang demikian sejalan pula dengan definisi akuntabilitas yang dirumuskan dalam *the Harper Colins Dictionary of American Government and Politics* (Shafritz, 1992:15) yang memberikan muatan makna pada akuntabilitas sebagai:

(1) the extent to which one must answer to higher authority –legal or organizational- for one’s action in society at large or within one’s organization; and (2) an obligation for keeping accurate records of property, documents or funds.

Definisi tersebut berisi sejumlah konsep yang saling terkait, yaitu: (1) pemegang kewenangan tertinggi atau lembaga pengawas, tindakan administratif dalam masyarakat atau dalam organisasi, dan (2) catatan formal dan pelaporan. Adapun substansi yang dilaporkan adalah kinerja organisasi yang diukur berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh pemegang kewenangan.

Akuntabilitas memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kinerja, sejumlah pakar kemudian merumuskan konsep akuntabilitas bukan lagi sekedar proses penyampaian laporan tetapi juga menyangkut kualitas dari substansi yang dilaporkan. Paul (1991:33) mendefinisikan akuntabilitas sebagai *“holding individuals and organizationals responsible for performance measured as objectively as possible”*. Definisi ini memiliki implikasi dari pengawasan, dan menurut Mansfield (1982:11) melibatkan jawaban yang terdokumentasikan atas empat pertanyaan pokok terkait dengan penyampaian pelayanan dan kinerja: *“untuk apa (for what) atau untuk tujuan apa pelayanan diadakan, kepada siapa (to whom) pelayanan diberikan, kapan (when) pelayanan disampaikan, dan dengan cara apa (by what means) pelayanan disampaikan?”*.

Sedikit berbeda dengan definisi akuntabilitas tersebut, Shafritz (1992:102) memberikan definisi yang lebih luas tentang akuntabilitas. Dalam pandangan Shafritz, akuntabilitas atau yang disebut dengan *administrative accountability* adalah:

“The concept that officials are to be held answerable for general not democracy and morality as well as spesific legal mandates”.

Definisi akuntabilitas administratif ini memberikan pemikiran, bahwa terdapat perbedaan antara “konsep umum” tentang kinerja yang berisikan norma dan nilai-nilai masyarakat, dengan kepatuhan formal atau operasional terhadap tugas legal. Penjelasan Shafritz tersebut memberikan penegasan bahwa praktek akuntabilitas sebenarnya tidak cukup hanya dibatasi pada wilayah legal yang didasari suatu mandat, dari bawahan ke pimpinan dalam satu organisasi atau pada pihak lain yang memberikan mandat tersebut.

Rasul, Sjahrudin (2003) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.

Konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang di sini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber seperti dikutip Ndraha (2003:85) ada tiga macam tipe ideal wewenang, *pertama* wewenang tradisional *kedua* wewenang karismatik dan *ketiga* wewenang legal rational. *Ketiga* ini yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan

Darwin sebagaimana dikutip Widodo (2001:148), membedakan konsep pertanggungjawaban menjadi tiga. *Pertama*, akuntabilitas (*accountability*), *kedua*, tanggungjawab (*responsibility*) dan *ketiga* responsivitas (*responsiveness*). Sebelum menjelaskan tentang pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*), di sini akan dijelaskan lebih dahulu pertanggungjawaban sebagai tanggungjawab (*responsibility*) dan sebagai responsivitas (*responsiveness*).

Tanggungjawab (*responsibility*) merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. Administrasi negara dinilai bertanggungjawab apabila pelakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi. Sedangkan konsep responsivitas (*responsiveness*) merupakan pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat). Seberapa jauh mereka melihat administrasi negara (birokrasi publik) bersikap tanggap (*responsive*) yang lebih tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka.

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak

diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada pada institusi tentang “*cheks and balance*” dalam sistem administrasi

Mahsun (2006:84) membedakan akuntabilitas dan responsibilitas, menurutnya keduanya merupakan hal yang saling berhubungan tetapi akuntabilitas lebih baik dan berbeda dengan akuntabilitas. Akuntabilitas didasarkan pada catatan/laporan tertulis sedangkan responsibilitas didasarkan atas kebijaksanaan. Akuntabilitas merupakan sifat umum dari hubungan otoritas asimetrik misalnya yang diawasi dengan yang mengawasi, agen dengan prinsipal atau antara yang mewakili dengan yang diwakili. Dari segi fokus dan cakupannya, responsibility lebih bersifat internal sedangkan akuntabilitas lebih bersifat eksternal

Mahsun (2006:83) membedakan akuntabilitas dalam arti sempit dan arti luas, akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Sedang pengertian akuntabilitas dalam arti luas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2000:43), akuntabilitas diartikan sebagai “*required or expected to give an explanation for one’s action*” Akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan. Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

Budiarjo (1998:78) mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberinya mereka mandat Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban

dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. Sedarmayanti (2004:43) mendefinisikan sebagai sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawabana yang dilaksanakan secara periodik

Lembaga Administrasi Negara (2000:23) menyimpulkan akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk memberikan mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam atau tipe, Jabra & Dwidevi (dalam Wasistiono, 2005:61) mengemukakan adanya lima perspektif akuntabilitas yaitu;

1) Akuntabilitas Administratif/Organisasi

Akuntabilitas administrasi adalah pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.

2) Akuntabilitas Legal,

Akuntabilitas jenis ini merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang undangan yang berlaku

3) Akuntabilitas Politik,

Akuntabilitas dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik

4) Akuntabilitas Profesional

Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.

5) Akuntabilitas Moral.

Akunatabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

Carino, LV (1991) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik yang masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan kewenangannya. Ada 4 (empat) dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain, yaitu siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas; kepada siapa dia berakuntabilitas; apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitasnya; dan nilai akuntabilitas itu sendiri.

Setiap orang harus benar-benar menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya akan memberi pengaruh pada dirinya sendiri saja. Akan tetapi, ia harus menyadari bahwa tindakannya juga akan membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah harus memperhatikan lingkungannya.

Ghartey (1987) menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan *stewardship* yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan, oleh karena itu praktek akuntabilitas sebenarnya tidak cukup hanya dibatasi pada wilayah legal yang didasari suatu mandat, dari bawahan ke pimpinan dalam satu organisasi atau pada pihak lain yang memberikan mandat tersebut. Akuntabilitas, lebih dari itu, harus diterapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sebagai salah satu wujud dari organisasi.

Akuntabilitas menjadi wacana dan pembicaraan dalam penerapan kebijakan publik, dan pengembangan organisasi. Namun dalam penerapan di

lapangan, tak jarang aspek-aspek yang mempengaruhi akuntabilitas tercecer dan tak diperhatikan secara utuh dan lengkap.

Ada 7 (tujuh) aspek yang harus diperhatikan dalam mengembangkan dan membangun akuntabilitas dalam organisasi, yaitu. *Pertama*: Transparansi yaitu keterbukaan yang merupakan hal pokok dalam akuntabilitas. *Kedua*: Sistem dan Prosedur yang ter-update secara periodik setahun sekali dan maksimal 2 tahun sekali. *Ketiga*: Partisipatif representatif yaitu Keikutsertaan dari karyawan yang kemudian terwakilkan dalam kepentingan bersama pada jenjang yang lebih tinggi, *Keempat*: Evaluasi dan Review pada tahapan ini, evaluasi dan review difokuskan pada metodologi dan validitas pengumpulan masukan; proses pembuatan kebijakan; dan respon penerapan kebijakan dari pengguna aktif (*end user*) di lapangan. Juga perlu diperhatikan apakah konten dan konteksnya masih relevan, memenuhi rasa keadilan, dan proposional sesuai kemampuan organisasi? *Kelima*: Keluhan dan respon, apakah ada wadah untuk menampung keluhan dari semua pemangku kepentingan dan apakah responnya telah dilakukan dengan cepat, tepat dan efektif sesuai harapan pemangku kepentingan? *Keenam*: Monitoring, pemantauan bisa dilakukan dengan pengetatan sistem dan prosedur; kesungguhan atasan langsung untuk menjalankan program dan kebijakan; komitmen pimpinan tertinggi untuk memastikan garis kebijakan telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan efektif; pemeriksaan rutin internal audit; pembentukan Dewa Kehormatan; serta pelibatan eksternal audit yang independen bila dirasakan perlu. *Ketujuh*: Kebijakan Futuristik, apakah program-program dan kebijakan itu mengacu pada kepentingan jangka panjang untuk kemaslahatan semua pemangku kepentingan, sesuai standard minimal prasarana sekolah? Upaya lain untuk membuat kebijakan futuristik yang membunikan dan didukung sumber daya yang ada dapat dilakukan dengan studi banding serta patok-duga (*benchmark*), sehingga pada akhirnya dapat dirasakan akan semakin mendekatkan pada visi dan misi organisasi.

Mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat dari pemerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.” Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan

melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan, sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*) menurut Miriam Budiardjo (1998:107-120).

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan negara untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan secara terbuka kepada masyarakat. Akuntabilitas adalah konsekuensi dari prinsip pemerintahan sebagai organisasi publik yang mendapatkan mandat dari rakyat. Pengertian Akuntabilitas menurut Solihin (2006:27) adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan;
2. Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi;
3. Akuntabilitas juga menunjukkan adanya *traceableness* yang berarti dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya, serta *reasonableness* yang berarti dapat diterima secara logis.

Menurut Tjokroamidjojo (2001: 45) ada jenis-jenis akuntabilitas sebagai berikut:

1. Akuntabilitas politik dari pemerintahan melalui lembaga perwakilan.
2. Akuntabilitas keuangan melalui pelebagaan anggaran (budget) dan pengawasan BPK.
3. Akuntabilitas hukum, dalam bentuk aturan hukum, reformasi hukum dan pengembangan perangkat hukum.
4. Akuntabilitas ekonomi (efisiensi), dalam bentuk likuiditas dan (tidak) kepailitan dalam suatu pemerintahan yang demokratis, tanggung gugat rakyat melalui sistem perwakilan.

Menurut Wasistiono (2002:55) akuntabilitas dapat ditarik empat materi kunci disebutkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas adalah kewajiban sebagai konsekuensi logis dari adanya pemberian hak dan kewenangan;
2. Kewajiban tersebut berbentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja dan tindakan;
3. Kewajiban tersebut melekat pada seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif;
4. Pertanggung-jawaban ditujukan kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk hal tersebut.

Pemerintah dituntut melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang amanat rakyat untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai perwujudan dari political will menuju Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan kata lain sebagai salah satu syarat untuk menuju Tata Pemerintahan yang baik adalah pertanggungjawaban Pemerintah kepada rakyat (*publicly accountable*), pertanggungjawaban itu merupakan konsep yang luas yang mensyaratkan entitas yang menguasai sumber daya publik untuk memberikan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya. Dalam pelaksanaan semua aktivitas Pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan publik sudah seharusnya dipertanggung jawabkan kepada publik, tuntutan tersebut mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*), bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Dimana akuntabilitas horizontal, adalah pertanggung-jawaban kepada masyarakat. Sedangkan akuntabilitas vertikal, adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (Mardiasmo, 2002:21).

Konsep akuntabilitas mensyaratkan adanya perhitungan "*cost and benefits analysis*" (tidak terbatas dari segi ekonomi, tetapi juga sosial, dan sebagainya tergantung bidang kebijaksanaan atau kegiatannya) dalam berbagai kebijaksanaan dan tindakan aparat pemerintah. Selain itu, akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program. Dengan demikian, tidak ada satu kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah yang dapat lepas dari prinsip ini.

Secara umum dalam setiap pengelolaan anggaran dalam bentuk kegiatan selalu di kaitkan dengan akuntabilitas publik. Hal ini dapat dilihat dari defenisi akuntabilitas yang merupakan hal yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Keterkaitan atau pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dalam bentuk kegiatan (pembangunan ruang laboratorium IPA SMP) dapat dilihat bahwa akuntabilitas dengan seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh para pemegang otoritas publik. Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja prilakunya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis mengenai akuntabilitas pengelolaan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP di Kabupaten Gresik, maka panitia P2S, telah melakukan apa yang telah digariskan yaitu melakukan laporan pertanggungjawaban kegiatan, keuangan dan pencapaian akhir dari suatu kegiatan (keberhasilan dan kegagalan) dalam program tersebut

Akuntailtas dalam penelitian ini merupakan variabel yang menjadi objek penelitian, untuk melihat sejauhmana para P2S melakukan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukannya, apakah laporan telah dibuat sesuai dengan kegiatan yang dilakukan atau hanya sekedar laporan untuk memenuhi unsur dalam suatu kegiatan di instansi pemerintah khusus kegiatan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP.

2.3. Tipe-tipe Akuntabilitas

Beberapa pakar membagi akuntabilitas dengan beberapa tipe, yang diantara mereka berbeda satu dengan lainnya. Seperti misalnya pembagian akuntabilitas dari Jabra dan Dwidevi (dalam Wasistiono, 2005:35), yang terdiri dari lima perspektif, yakni:

1. Akuntabilitas organisasional /administratif;
2. Akuntabilitas legal;
3. Akuntabilitas politik;
4. Akuntabilitas profesional;
5. Akuntabilitas moral

Dalam hal kepada siapa akuntabilitas ditujukan, dalam konteks sektor publik dikenal apa yang disebut dengan *multiple accountability*. Mengenai hal ini menurut Heeks (1998) pada sektor publik dikenal beberapa jenis akuntabilitas:

1. *Managerial accountability*: akuntabilitas kepada pimpinan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi;
2. *Political accountability*: kepada institusi yang memberikan legitimasi politik kepada instansi yang bersangkutan;
3. *Financial accountability*: kepada institusi yang menyediakan/ memberikan anggaran kepada intitusi yang bersangkutan;
4. *Public accountability*: kepada warga Negara/masyarakat;

Menurut Ellwood (1993, dalam Mardiasmo 2002:21) terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum atau *accountability for probity and legality*;
2. Akuntabilitas proses atau *process accountability*;
3. Akuntabilitas program atau *program accountability*;
4. Akuntabilitas kebijakan atau *policy accountability*.

Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*). Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran dari penyalahgunaan jabatan atau *abuse power*. Sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan birokrat terhadap hukum dan jaminan penegakan hukum serta

peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumberdaya publik. Ukuran dari akuntabilitas hukum, adalah peraturan perundangan yang berlaku.

Akuntabilitas proses (*process accountability*) yang terkait dengan memadai tidaknya prosedur dalam rangka pelaksanaan tugas akuntabilitas proses mencakup kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

Akuntabilitas program (*program accountability*) terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberi hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

Dimensi terakhir, yakni akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap legislatif dan masyarakat luas.

Mardiasmo (2002:377) menjelaskan akuntabilitas “...*can thus be vertically or horizontally oriented, be targeted at the politicians, bureaucrats or the public; and internally or externally based.*” Pembagian akuntabilitas menjadi akuntabilitas vertikal dan horisontal lebih dimaksudkan untuk menegaskan pihak pemberi amanah (*principal*) sebagai pihak yang memiliki hak dan otoritas untuk meminta pertanggungjawaban.

Menurut Mardiasmo (2002:227) dalam era reformasi dewasa ini, *policy audit* juga telah menjadi tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan adanya tuntutan dilakukannya transparansi kebijakan oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan, serta terlibat dalam pengambilan keputusan. Akuntabilitas sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik. Berdasarkan dari definisi-definisi tersebut di atas maka penulis menyimpulkan bahwa akuntabilitas adalah perwujudan dari kewajiban organisasi publik untuk mempertanggungjawabkan

pemanfaatan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Menurut B. Guy Peter (2000:299) menyebutkan adanya 3 (tiga) tipe akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas keuangan
2. Akuntabilitas administratif
3. Akuntabilitas kebijakan publik

Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan, sedangkan akuntabilitas administratif berkaitan dengan sistim pencatatan dan pendokumentasian berbagai aktivitas terutama dokumentasi keuangan. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawaban secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih (constituency) para pemimpin politik, teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana di lapangan.

Lebih jauh, LAN RI dan BPKP (2001:29) menjelaskan pembagian akuntabilitas sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah

- b. Akuntabilitas manfaat

Akuntabilitas manfaat (efektivitas) pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini, seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan (dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya) dan tidak hanya sekedar

kepatuhan terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Efektivitas yang harus dicapai bukan hanya berupa output akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut pandang output akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut pandang outcome. Akuntabilitas manfaat hampir sama dengan akuntabilitas program.

c. Akuntabilitas Prosedural

Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggung jawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. Pengertian akuntabilitas prosedural ini adalah sebagaimana dengan akuntabilitas proses.

Berdasarkan deskripsi akuntabilitas yang demikian itu, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian yang demikian itu, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan. (LAN RI dan BPKP, 2001: 43), Dengan kata lain dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya.

Menurut Deklarasi Tokyo mengenai petunjuk akuntabilitas public (tahun 1985) menetapkan definisi bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung-jawaban fiscal, manajerial, dan program. Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian)

mengenai standard pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standard-standard tersebut. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegangan pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Media akuntabilitas lain yang cukup efektif dapat berupa laporan tahunan tentang pencapaian tugas pokok dan fungsi dan target-target serta aspek penunjangnya seperti aspek keuangan, aspek sarana dan prasarana, aspek sumber daya manusia dan lain-lain

2.4. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar/prinsip penting dalam *good governance* juga memiliki beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam rangka efektivitas penerapan konsep akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut menurut *Citizen's Circle of Accountability* dalam Stewart seperti dikutip (LAN dan BPKP, 2001) meliputi:

1. Intentions Disclosure

Wajar bagi pengemban akuntabilitas yang melakukan kegiatan-kegiatan yang akan mempengaruhi publik, untuk menyampaikan kepada publik hasil-hasil

atau *outcomes* yang akan diberikan. Juga dikemukakan alasan-alasan mengapa *outcomes* tersebut bermanfaat, adil, dan wajar. Salah satu bentuk akuntabilitas dapat dilakukan dalam bentuk ekuitas.

2. *Directing Mind Visibility*

Laporan pemerintah atau organisasi lain yang mempengaruhi publik dalam hal-hal yang penting harus mengidentifikasi *directing mind* atau *will* dari mereka yang bertanggungjawab dan akuntabel untuk suatu kegiatan tertentu. Laporan tersebut dipublikasikan untuk melaporkan kegiatan apa yang telah dilakukan oleh anggota organisasi, baik yang benar-benar telah dilakukan atau yang gagal dilaksanakan.

3. *Performance Visibility*

Kinerja aktual harus diungkapkan melalui akuntabilitas publik yang memadai oleh para pemegang tanggungjawab yang memiliki akuntabilitas kinerja. Pihak berwenang memberikan akuntabilitas bagi semua kegiatan yang dilaksanakan dan pembelajaran yang diperoleh dari penerapannya dengan tepat waktu.

4. *Reciprocal Accountability*

Mereka yang memiliki posisi senior dalam suatu organisasi menyampaikan akuntabilitas kepada anggota-anggota organisasi tentang tiga hal, yang meliputi: (a) untuk apa memilih tujuan-tujuan tertentu, (b) untuk siapa; dan (c) sumbangsih apa yang diharapkan.

5. *The Balance of Power, Duties and Accountability*

Keseimbangan antara kekuasaan, tugas dan akuntabilitas akan mempengaruhi kewajaran dalam pemberian pertanggungjawaban. Selain itu juga memberikan harapan-harapan untuk mengatasi hambatan-hambatan

6. *Answering for Precaution taken*

Merupakan suatu kewajiban bagi para pengambil keputusan untuk memberikan informasi yang memadai tentang resiko-resiko penting bagi keselamatan masyarakat, sosial, keadilan hukum dan lingkungan serta apa yang bisa dilakukan untuk sedapat mungkin menghindari atau meminimalkan resiko-resiko tersebut.

7. *Corporate Fairness*

Terjadinya *conflict of interest* yang timbul antara melayani kepentingan publik dan melayani keinginan publik dan manajemen organisasi menentukan adanya pertanggungjawaban yang dipublikasikan, pertanggungjawaban ini dapat mengurangi kemungkinan suatu organisasi berlaku tidak wajar dan merugikan publik.

8. *Citizen Caution*

Warga negara berperan aktif dalam meminta haknya untuk pertanggungjawaban, serta menggunakan pertanggungjawaban tersebut secara wajar.

9. *Validation of Assertions*

Pertanggungjawaban publik untuk kehendak-kehendak, hasil-hasil atau pembelajaran yang dilakukan memperoleh validasi dari kelompok publik yang berminat dan memiliki pengetahuan, atau para praktisi yang profesional atau keduanya.

10. *Rights Roles*

Para pengemban tanggungjawab memberikan pertanggungjawaban untuk kehendak-kehendaknya, alasan-alasan yang dilakukan dan hasil-hasil yang dicapai. Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawabn tidak dapat dialihkan kepada Inspektur eksternal, pemeriksa komisaris, ombudsman, atau penilai lainnya.

11. *Governing Body and Citizen Responsibility*

Untuk membantu meningkatkan kewajaran dan kelengkapan pertanggungjawaban, badan-badan yang memiliki legitimasi untuk memberikan pertanggungjawaban melakukannya secara wajar, jujur dan bertanggungjawab. Hal ini berlaku bagi kedua belah pihak pemerintah maupun kelompok masyarakat yang berkepentingan.

12. *Wage of Abdications*

Sepanjang pertanggungjawaban telah diberikan secara wajar, dan penilaian publik telah dilakukan dengan wajar, dan dinilai ada indikasi penyimpangan,

akuntabilitas memberikan orientasi untuk menindaklanjuti penyalahgunaan wewenang, serta menunjuk warga negara lain yang lebih kompeten.

Berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah:

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
 - a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
 - b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders.
 - c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
 - d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
 - e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:
 - a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
 - b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
 - c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
 - d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

2.5. Partisipasi dalam Pembangunan

Partisipasi secara harfiah berarti keterlibatan atau keikutsertaan. Partisipasi merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui . Partisipasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses dimana sejumlah pelaku bermitra mempunyai pengaruh dan membagi wewenang di dalam prakarsa “pembangunan”, termasuk mengambil keputusan atas sumberdaya nya, yang artinya pembangunan partisipasi dapat mencapai puncaknya dalam upaya pemberdayaan (Sajogo, 2002:5). Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Cooper dalam Mc. Lavery (2002:15) menjelaskan bahwa partisipasi publik, terutama dalam proses pengambilan keputusan adalah sarana untuk memenuhi hak dasar sebagai warga.

Tujuan dari partisipasi publik adalah untuk mendidik dan memberdayakan warga. Menurut Marschall (2004:231), tujuan dari partisipasi public adalah pada dasarnya untuk mengkomunikasikan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan sebagaimana juga membantu dalam pelaksanaan pelayanan.

Partisipasi dapat diwujudkan dari skala kecil dalam keluarga sampai kepada partisipasi di tingkat nasional. Kegiatan partisipasi dapat digerakkan oleh ahli atau pemerintah, atau oleh masyarakat dan juga oleh pihak ketiga. Dalam hal ini Oakley, seperti yang dikutip oleh Grant (2002:9) menjelaskan perbedaan antara partisipasi sebagai alat dan partisipasi sebagai tujuan akhir. Sebagai alat partisipasi digunakan/dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, misalnya pelayanan. Sedangkan partisipasi sebagai tujuan akhir dapat dilihat sebagai proses dimana orang-orang membangun dan memperkuat kemampuan mereka untuk secara langsung mempengaruhi atau mengawasi pembangunan.

Menurut Gaventa dan Valderama (2001:33) terdapat 3 (tiga) tradisi konsep dalam partisipasi yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Partisipasi politik

Partisipasi politik digunakan untuk menunjuk pelibatan dan interaksi perseorangan atau organisasi. Partisipasi lebih dimaknai sebagai tindakan

individu atau kelompok terorganisir untuk melakukan pemungutan suara, kampanye, protes, atau untuk mempengaruhi wakil-wakil pemerintah. Dimana dalam partisipasi politik lebih berorientasi dalam mempengaruhi dan mendudukan wakil-wakil rakyat dalam lembaga-lembaga perwakilan. Partisipasi poliik lebih menekankan pada representasi.

b. Partisipasi sosial

Partisipasi sosial lebih tertuju kepada keterlibatan individu atau lembaga dalam perencanaan dan implementasi pembangunan. Steifel dan Wolfe (1994:22) mengartikan partisipasi sosial sebagai upaya partisipasi yang terorganisasi dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur dalam keadaan sosial tertentu oleh pelbagai kelompok dan gerakan yang sampai sekarang dikesampingkan dalam fungsi pengawasan. Partisipasi jenis ini biasanya beroperasi di luar negara atau lembaga-lembaga formal pemerintahan.

c. Partisipasi warga

Partisipasi warga merupakan satu bentuk pengalihan konsep partisipasi dari sekedar kepedulian terhadap “penerima derma” atau “kaum tersisih” menuju ke suatu kepedulian dengan pelbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi mereka.

Menurut Ach. Wazir Ws, *et al.* (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Ketiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak

demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

- a) Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- b) Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- c) Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- d) Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e) Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- f) Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

- g) Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

2.6. Transparansi dalam Pembangunan Daerah

Transparansi secara harafiah ditinjau dari segi bahasa adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Jadi pengertian transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dengan kata lain transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan program yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi merupakan satu di antara pilar penunjang terwujudnya proses demokratisasi sosial dan politik. Istilah ini sering dipahami sebagai keterbukaan lembaga dalam memberikan akses informasi bagi anggota tentang penyelenggaraan sebuah program.

Minogue (dalam Krina, 2003) menyatakan: *“Holders of public office should be as open as possible about all the decisions and actions that they take. They should give reasons for their decisions and restrict information only when the wider public interest clearly demands”*.

Informasi dan keterbukaan ini mencakup: (1) Memberikan fakta dan analisis tentang keputusan-keputusan kebijakan, (2) Menjelaskan alasan-alasan dari keputusan-keputusan administratif, (3) Membuka informasi “guidelines internal” tentang cara-cara bagian tersebut berhubungan dengan publik, (4) Menyediakan informasi tentang biaya, target dan performansi dari pelayanan publik, dan prosedur-prosedur untuk mengeluh dan mengadu, dan (5) Memenuhi permintaan informasi khusus

Dalam pengelolaan suatu perusahaan atau organisasi, terlebih dahulu manajemen organisasi menetapkan tujuan dan sasaran, kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan keuangan yang diperkirakan akan terjadi sebagai akibat dari rencana kerja tersebut, kemudian disusun dan dievaluasi melalui proses penyusunan anggaran. Pada dasarnya anggaran yang bermanfaat dan realistis tidak hanya dapat membantu mempererat kerja sama karyawan, memperjelas kebijakan dan merealisasikan rencana saja, tetapi juga dapat menciptakan keselarasan yang lebih baik dalam perusahaan dan keserasian tujuan diantara para manajer dan bawahannya. Dengan anggaran, manajemen mengarahkan jalannya kondisi perusahaan, tanpa anggaran, dalam jangka pendek perusahaan akan berjalan tanpa arah, dengan pengorbanan sumber daya yang tidak terkendali, maka anggaran merupakan pedoman untuk melakukan operasi selama periode anggaran dan merupakan proyeksi dari hasil operasi yang mungkin dapat dicapai. Menurut Raharjo (2003:9), transparansi anggaran adalah keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penggunaan uang dan sebagainya.

Menurut Mardiasmo (2004:30) transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Rahman (2000:151) transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang

sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu; (1) salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan public, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Transparansi berarti juga terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah— dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (*reliable*) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau. Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas mewujudkannya dalam pelaksanaan

administrasi publik sehari-hari, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini.

Pertama, kondisi masyarakat yang apatis terhadap program-program pembangunan selama ini membutuhkan adanya upaya - upaya khusus untuk mendorong keingintahuan mereka terhadap data/informasi ini. Untuk itu, dibutuhkan adanya penyebaran (diseminasi) informasi secara aktif kepada seluruh komponen masyarakat, tidak bisa hanya dengan membuka akses masyarakat terhadap informasi belaka.

Kedua, pemilihan media yang digunakan untuk menyebarkan informasi dan substansi/materi informasi yang disebarluaskan sangat bergantung pada segmen sasaran yang dituju. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat awam sangat berbeda dengan yang dibutuhkan oleh organisasi nonpemerintah, akademisi, dan anggota DPRD, misalnya. Selain itu, seringkali cara-cara dan media yang sesuai dengan budaya lokal jauh lebih efektif dalam mencapai sasaran daripada “media modern” seperti televisi dan surat kabar.

Ketiga, seringkali berbagai unsur non-pemerintah, misalnya pers, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lebih efektif untuk menyebarkan informasi daripada dilakukan pemerintah sendiri. Untuk itu, penginformasian kepada berbagai komponen strategis ini menjadi sangat penting.

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Rahman. 2003:55). Prinsip transparansi ini memiliki 2 (dua) aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.

Transparansi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan akuntabilitas publik. Bagaimana masyarakat dapat menilai tindakan pemerintah? Hal ini tentu sangat tergantung pada transparansinya. Masyarakat dapat menilai tindakan pemerintah atau organisasi bersifat akuntabel atau tidak, tergantung pada kemampuan masyarakat untuk memahami dengan mudah apa yang dilakukan oleh

pemerintah atau organisasi, mengapa pemerintah atau organisasi melakukannya, dan bagaimana tindakan pemerintah atau organisasi itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Kalau masyarakat tidak dapat memahami apa yang dilakukan oleh pemerintahnya atau organisasinya, memahami rasionalitas dari tindakan itu, serta membandingkannya dengan nilai-nilai yang mereka miliki, maka akan sulit untuk menilai akuntabilitas dari tindakan pemerintah atau organisasi. Di sini transparansi memiliki peran penting dalam pengembangan akuntabilitas publik karena dengan mewujudkan transparansi maka pemerintah atau organisasi setidaknya telah mempermudah masyarakat untuk mengetahui tindakannya, rasionalitas dari tindakan itu, serta membandingkan dengan sistem nilai yang ada. Tanpa transparansi maka tidak akan ada akuntabilitas publik.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:

- 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik,
- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik,
- 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Hal utama bagi pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan sebuah organisasi/lembaga, termasuk pemerintahan adalah adanya *goodwill* penyelenggara organisasi / lembaga dan kepercayaan anggota organisasi, kemudian disusul dengan ketegasan dari pimpinan untuk melaksanakannya. Tanpa modal awal tersebut maka pelaksanaan *good governance* (khususnya akuntabilitas dan transparansi) di suatu organisasi akan terhambat.

2.7. Operasional Variabel dan Indikator

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas program bantuan (subsidi) tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan, mengingat program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA ini merupakan program swakelola yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah. Akuntabilitas lebih menekankan pada nilai-nilai personal yaitu lebih kepada pelayanan pihak-pihak yang terkait dimana laporan pertanggungjawaban yang dibuat harus mengandung informasi yang jujur, objektif dan transparan.

Mengukur konsep akuntabilitas, berawal dari pemikiran bahwa, setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang/instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program kegiatan diutarakan oleh Shafriz dan Russel (1997:376). Untuk itu penulis mengacu pada konsep Stewart yang dikutip oleh LAN RI dan BPKP (2001) bahwa prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan konsep akuntabilitas adalah; (1) *Intentions Disclosure*, (2) *Directing Mind Visibility*, (3) *Performance Visibility*, (4) *Answering for Precaution Taken*. Sementara konsep yang dikemukakan Ellwood (1993) seperti dikutip Mardiasmo (2002;21) bahwa terdapat tiga dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: (1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum atau *accountability for probity and legality*; (2) Akuntabilitas proses atau *process accountability*; dan (3) Akuntabilitas program atau *program accountability*. Angket/kuesioner terbentuk dari indikator, dan indikator merupakan interpretasi dari dimensi. Untuk lebih memahaminya dapat dilihat tabel di bawah ini

Tabel 2.1.
Indikator Akuntabilitas

No	Dimensi	Indikator Pencapaian	No. Instrumen	∑ soal
1	<i>Intentions Disclosure</i>	a) menyampaikan laporan kepada publik	1,2,3 (laporan akuntabilitas kepada atasan/ orang tua/ P2S)	3
		b) laporan bermanfaat, adil dan wajar	4,5,6 (laporan sesuai fakta/sama)	3

			persepsi/sesuai kaidah laporan)	
2	<i>Directing Mind Visibility</i>	a) laporan harus dipublikasikan b) melaporkan kegiatan yang telah dilakukan atau gagal dilaksanakan	7,8,9 (dipublikasikan ke komite/mading/kalangan sendiri) 10,11,12 (laporan ke Dir. PSMP/laporan kemajuan dan kegiatan yg belum dicapai)	3 3
3	<i>Performance Visibility</i>	a) mengungkap kinerja aktual b) semua pihak memberikan akuntabilitas untuk semua kegiatan	13,14,15 (laporan berkala/laporan hambatan/kendala keuangan) 16,17,18 (kepala sekolah dan guru laporan akuntabilitas ke Dit. PSMP)	3 3
4	<i>Answering for Precaution Taken</i>	a) para pengambil keputusan memberikan informasi tentang resiko keselamatan masyarakat, keadilan hukum dan lingkungan b) para pengambil keputusan memberikan informasi tentang sesuatu yang dapat dilakukan untuk menghindari atau meminimalkan resiko tersebut	19,20,21 (kepala sekolah memberikan informasi kepada masyarakat perihal dampak pembangunan) 22,23,24 (kepala sekolah memberikan informasi keselamatan dan pengamanan pembangunan)	3 3
5	<i>Accountability for Probity and Legality</i>	a) penghindaran dari penyalahgunaan jabatan b) kepatuhan birokrat terhadap hukum dan jaminan penegakan hukum serta peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumberdaya publik	25,26,27 (kepala sekolah dan guru memberikan laporan sesuai fakta dan buku kas umum) 28,29,30, 43 (panitia pembangunan sekolah/P2S telah memberikan laporan sesuai juklak dan peraturan)	3 4

6	<i>Process Accountability</i>	a) kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi	31,32,33,44 (panitia pembangunan sekolah/P2S berkemampuan dalam SIM/akuntansi)	4
		b) pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya	34,35,36,45 (panitia pembangunan sekolah/P2S memberikan layanan cepat/mendengarkan aspirasi)	4
7	<i>Program Accountability</i>	a) tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak	37,38,39 (panitia pembangunan sekolah/P2S menetapkan target dan tujuan dengan jelas)	3
		b) mempertimbangkan alternatif program yang memberi hasil yang optimal dengan biaya yang minimal	40,41,42 (panitia pembangunan sekolah/P2S telah menambah pekerja untuk mempercepat pembangunan)	3
	7	14	45	45

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif, artinya data yang diperoleh berdasarkan pada penyebaran angket, kemudian dianalisis secara perhitungan matematis, hal ini disebabkan data yang diperoleh berbentuk angka. Hasil analisis yang kemudian diinterpretasikan/ditafsirkan sehingga akan menghasilkan suatu hasil penelitian seperti yang diharapkan

Penelitian ini dilakukan mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan dalam Bab I dimana permasalahan penelitian dimunculkan berkaitan dengan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan dana swakelola bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP. Tujuan penelitian yang telah ditetapkan, yakni untuk mengkaji secara mendalam dan menyeluruh untuk mengetahui bagaimana prinsip akuntabilitas sudah dijalankan oleh SMP baik negeri maupun swasta dalam melaksanakan program pembangunan ruang laboratorioum IPA di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Secara operasional penelitian ini memusatkan perhatian pada aspek akuntabilitas dalam bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP dengan menggunakan mekanisme swakelola. Untuk memperoleh gambaran mengenai akuntabilitas dalam bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA diperlukan metode penelitian sebagai alat untuk menggali informasi faktor-faktor yang diteliti di lokasi penelitian. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yaitu tindakan mengukur atau memperkirakan suatu keadaan atau kejadian. Metode survey biasanya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam, tetapi generalisasi yang dapat lebih akurat bila digunakan sampel yang representative.

Survey dapat dimaknai sebagai tindakan mengukur atau memperkirakan. Namun dalam penelitian survey lebih berarti sebagai suatu cara melakukan

pengamatan di mana indikator mengenai variabel adalah jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan kepada responden baik secara lisan maupun tertulis. Survey biasanya dilakukan satu kali. Peneliti tidak berusaha untuk mengatur atau menguasai situasi. Jadi perubahan dalam variabel adalah hasil dari peristiwa yang terjadi dengan sendirinya.

Penelitian survey termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif, meskipun dalam survey sudah banyak dikembangkan menjadi penelitian, penelitian yang sudah mulai melakukan ‘inferensial’, melakukan prediksi tertentu. Dalam hal ini hasil survey diharapkan sanggup ‘menginferens, meramalkan dalam tingkatan tertentu terhadap situasi dan kondisi pada umumnya.

Dalam penelitian ini dilakukan mulai dari tahap merumuskan masalah hingga menyangkut penentuan wilayah penelitian, pengumpulan data dan analisis data, serta interpretasi data berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan akuntabilitas bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP di kabupaten Gresik, Jawa Timur. Berkaitan dengan masalah perijinan juga tidak bisa dianggap mudah, karena tanpa ijin dari instansi terkait, biasanya kegiatan penelitian mendapat banyak hambatan. Perijinan dilakukan peneliti melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya diteruskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan dana swakelola bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, yang dimaksud teknik pengumpul data adalah cara-cara yang dipergunakan untuk memperoleh data-data empiris yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Sedangkan alat yang digunakan untuk memperoleh data disebut intrumen penelitian.

Adapun teknik dan instrumen pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data melalui observasi bertujuan untuk melihat dan menilai kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap kualitas hasil pembangunan ruang laboratorium IPA SMP. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas ruang laboratorium IPA SMP yang dibangun dengan dana bantuan dari Pemerintah Pusat, mengetahui tingkat kesesuaian antara bangunan ruang laboratorium IPA SMP yang dibangun melalui dana bantuan dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian akuntabilitas pelaksanaan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP dilakukan dengan melihat dokumentasi-dokumentasi pelaksanaan serta laporan keuangannya.

2. Angket

Instrumen penelitian disusun untuk memperoleh data mentah berkaitan dengan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan ruang laboratorium IPA di Kabupaten Gresik. Pembentukan instrumen penelitian dapat melalui beberapa tahap yaitu dimulai dengan: 1) mengkaji semua teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti, 2) menyusun indikator dari setiap variabel, 3) menyusun kisi-kisi instrumen, 4) menyusun butir-butir pernyataan dan menetapkan skala pengukuran, 5) uji coba instrumen, 6) analisis butir soal dengan menguji validitas dan reliabilitas.

Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai pertanggungjawaban seseorang atau organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan, pertanggungjawaban tersebut dapat berupa laporan tentang keberhasilan atau laporan program yang belum terlaksana. Berdasarkan hal tersebut maka angket yang dikembangkan dalam penelitian ini mengandung 7 komponen akuntabilitas seperti yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

Untuk memperoleh data mengenai akuntabilitas pelaksanaan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA, maka dilakukan dengan cara

memberikan angket/kuesioner kepada para ketua dan para anggota pembangunan laboratorium IPA di Kabupaten Gresik. Angket yang digunakan berupa angket model skala Likert, yang memiliki rentang nilai 1 sampai 5; dengan alternatif jawaban sebagai berikut:

1 = Sangat tidak sesuai dengan kenyataan

2 = Kurang sesuai dengan kenyataan

3 = Tidak tahu

4 = Sesuai dengan kenyataan

5 = Sangat sesuai dengan kenyataan

Instrumen kuesioner/angket, terbentuk dari konsep/teori yang kemudian diuraikan menjadi dimensi, dan dari dimensi menjadi indikator, yang selanjutnya dibentuk menjadi instrumen angket.

Dengan demikian maka angket adalah cara pengumpulan data dengan mempergunakan pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam penelitian ini terdapat beberapa jenis angket disesuaikan dengan responden, yaitu: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Panitia Pembangunan ruang laboratorium IPA SMP unsur sekolah, orang tua dan stake holders lainnya di sekolah tersebut.

Masing-masing responden memberikan tanggapannya terhadap seluruh item pertanyaan atau pernyataan dalam angket tersebut merupakan respon yang digunakan untuk mengetahui bagaimana permasalahan akuntabilitas dalam pengelolaan dana swakelola dana bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP. Masing-masing responden akan menggambarkan bagaimana dukungan dan perannya dalam akuntabilitas pengelolaan dana swakelola tersebut.

Respon dari responden dalam angket diberikan berbentuk *check list*, sehingga pada angket ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden dengan cara memberikan tanda *check list* (✓) pada jawaban yang dipilihnya. Dalam angket peneliti mencari data dengan menggunakan populasi penelitian dan sampel penelitian sebagai berikut:

a. Populasi Penelitian

Populasi berperan penting dalam suatu penelitian, karena dengan populasi yang jelas, maka akan mudah untuk mengidentifikasinya. Populasi dalam penelitian ini adalah SMP baik negeri maupun swasta di Kabupaten Gresik Jawa Timur yang pada tahun 2010 menerima bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA, dan sebagai sampel penelitiannya berupa orang yang terlibat dalam pembangunan laboratorium IPA, dengan demikian sampel dari penelitian ini adalah panitia pembangunan sekolah (P2S) yang berada di wilayah Kabupaten Gresik. Dalam panitia pembangunan sekolah tersebut terdapat unsur-unsur sekolah (kepala sekolah dan guru), komite sekolah, dan unsur masyarakat (orang tua murid).

Obyek penelitian ini adalah akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Program Bantuan Pembangunan Laboratorium IPA di Sekolah Menengah Pertama pada Kabupaten Gresik, Jawa Timur dan indikator akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana terangkum dalam Tabel 2.1.

Alasan dipilihnya sekolah penerima bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA di Jawa Timur, Kabupaten Gresik sebagai populasi penelitian ini, karena pada tahun 2010 merupakan provinsi penerima bantuan terbanyak secara nasional dan kabupaten ini masih menerima bantuan program pembangunan ruang laboratorium IPA yang sama seperti tahun 2008. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Gresik tidak menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga masih menerima bantuan yang sama dari Kementerian Pendidikan Nasional. Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Pembinaan SMP tingkat rata-rata hasil monitoring dan evaluasi masih termasuk dibawah rata-rata.

b. Sampel Penelitian

Survey sampling dilakukan dalam penelitian ini karena tidak semua unit analisis dalam populasi diamati satu persatu, akan tetapi hanya sebagian saja, yang diwakili oleh sampel penelitian yaitu panitia pembangunan sekolah (P2S) pada 9 SMP yang berada di Kabupaten Gresik. Proses pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sampling non-probability melalui purposive sampling, hal ini dilakukan karena pertimbangan peneliti ingin mengetahui masalah akuntabilitas di Kabupaten Gresik, dimana rata-rata nilai hasil monev yang ditunjukkan Tabel 1.2 adalah terendah. Itulah sebabnya maka sampel penelitiannya berjumlah 72 orang yang terdiri dari Kepala sekolah, Ketua P2S, Sekretaris P2S, Bendahara P2S, 1 orang guru, 1 orang Komite sekolah dan 2 orang perwakilan orang tua siswa dari 9 SMP yang berada di Kabupaten Gresik.

3. Wawancara

Dengan wawancara akan diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan penelitian terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana swakelola bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP. Wawancara dilakukan terhadap beberapa responden untuk melakukan justifikasi terhadap respon responden yang telah dituangkan dalam jawaban angket. Dengan demikian hasil wawancara ini akan saling memperkuat dengan informasi yang diperoleh melalui angket.

3.3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dimaksudkan untuk membuat penafsiran data yang diperoleh dari hasil penelitian. Pengolahan data tersebut digunakan untuk mengetahui gambaran akuntabilitas pelaksanaan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP di kabupaten Gresik Jawa Timur. Data yang diperoleh dari angket, hasil observasi, hasil wawancara dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap pertanyaan dan pernyataan

mengenai akuntabilitas pelaksanaan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP. Data mengenai gambaran akuntabilitas dari angket dianalisis dengan menjumlahkan jawaban responden dari seluruh item pertanyaan atau pernyataan karena skor diperoleh dari angket yang menggunakan skala Likert, selanjutnya dicari perolehan rata-ratanya.

Data hasil wawancara dan observasi merupakan data kualitatif, sehingga analisa data nya dilakukan secara kualitatif dengan mengelompokkan respon sejenis dari masing-masing responden. Data hasil wawancara selanjutnya diklasifikasi dan diinterpretasi menjadi hasil penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian antara lain data nilai instrumen, data observasi kualitas ruang laboratorium IPA SMP dengan dana swakelola, angket akuntabilitas dan hasil wawancara pengelolaan dana swakelola bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP. Dari data-data hasil penelitian tersebut tersebut, data yang digunakan untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP ialah data nilai instrumen, dan data observasi kualitas ruang laboratorium IPA SMP dari seluruh responden dalam penelitian ini. Sedangkan data-data lainnya digunakan sebagai penunjang dalam pengolahan data. Data angket yang digunakan sebagai gambaran mengenai respon responden terhadap akuntabilitas pengelolaan dana pembangunan ruang laboratorium IPA SMP sebagai gambaran mengenai bagaimana pengelolaan keuangan dan pengelolaan administrasi dalam pembangunan ruang laboratorium IPA SMP. Sedangkan data hasil wawancara di gunakan sebagai gambaran mengenai kesesuaian antara jawaban dalam angket dengan kondisi riil yang sebenarnya yang ada di sekolah tersebut dan proses pelaksanaan pembangunan yang biasa dilakukan oleh sekolah. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan terhadap data-data di atas, antara lain :

1. Data Hasil Wawancara

Data tentang pembangunan ruang laboratorium IPA SMP hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis lebih lanjut, sebagai berikut:

- a) Mengelompokkan data hasil wawancara untuk masing-masing responden, yaitu: Kepala Sekolah, Ketua P2S, Bendahara P2S, Sekretaris P2S, Komite Sekolah, Guru, dan Orang tua murid.
- b) Mengelompokkan respon sejenis untuk masing-masing responden penelitian.
- c) Melakukan interpretasi sejenis dari masing-masing responden sehingga diperoleh gambaran terhadap pendapat responden.
- d) Menentukan makna akuntabilitas pengelolaan dana swakelola pembangunan ruang laboratorium IPA SMP masing-masing responden berdasarkan hasil wawancara.

2. Data Hasil Observasi

Pengolahan data hasil observasi ruang kualitas laboratorium IPA SMPsekolah dilakukan dengan cara menjumlahkan skor seluruh sekolah untuk setiap aspek kegiatan pengelolaan dana swakelola pembangunan ruang laboratorium IPA SMP yang dilakukan oleh sekolah untuk melihat aspek-aspek kegiatan pengelolaan dana swakelola pembangunan ruang laboratorium IPA SMP yang dilakukan oleh sekolah, selanjutnya jumlah skor seluruh sekolah kemudian dihitung dalam bentuk presentase dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{\text{Skor total Sekolah}}{\text{Skor Maksimum Ideal}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melihat kemampuan pengelolaan dana swakelola pembangunan ruang laboratorium IPA SMP yang ditunjukkan oleh sekolah dalam melakukan kegiatan pengelolaan dana swakelola pembangunan ruang laboratorium IPA SMP dilihat dari nilai skor setiap aspek kegiatan pengelolaan dana swakelola pembangunan ruang laboratorium IPA SMP yang diperoleh sekolah, kemudian skor setiap sekolah dijumlahkan untuk kemudian dihitung dalam bentuk persentase dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{\text{Jumlah sekolah Melakukan}}{\text{Jumlah Seluruh Sekolah}} \times 100\%$$

Untuk menginterpretasikan presentase yang diperoleh sekolah digunakan Tabel 3.1 kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1
Interpretasi Persentase Kemampuan pengelolaan dana swakelola pembangunan ruang laboratorium IPA SMP

Persentase	Interprestasi
$80 \leq X < 100$	Sangat Tinggi
$60 \leq X < 80$	Tinggi
$40 \leq X < 60$	Sedang
$20 \leq X < 40$	Rendah
$0 \leq X < 20$	Sangat Rendah

(Tapilow, 1997:76)

3. Data Hasil Angket

Pengolahan data hasil angket respon sekolah dan seluruh responden terhadap pengelolaan dana swakelola pembangunan ruang laboratorium IPA SMP yang dilakukan sekolah dengan cara mengklasifikasikan tanggapan masing-masing responden, selanjutnya jawaban tersebut di buat dalam bentuk presentase untuk mengetahui respon masing-masing responden terhadap pengelolaan dana swakelola pembangunan ruang laboratorium IPA SMP. Adapun presentase data angket tersebut dihitung dengan menggunakan rumus:

$$P(\%) = \frac{\sum \text{responden yang menjawab}}{\sum \text{responden}} \times 100\%$$

Presentasi data hasil pengolahan angket untuk masing-masing responden selanjutnya diinterpretasi untuk melihat tinggi-rendahnya respon responden terhadap akuntabilitas pembangunan ruang laboratorium IPA SMP melalui mekanisme swakelola dengan menggunakan Tabel. 3.2 dibawah ini

Tabel 3.2
Interpretasi Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Dana Swakelola
Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP

Persentase	Interprestasi
$80 \leq X < 100$	Sangat Tinggi
$60 \leq X < 80$	Tinggi
$40 \leq X < 60$	Sedang
$20 \leq X < 40$	Rendah
$0 \leq X < 20$	Sangat Rendah

(Tapilow, 1997:76)

3.4. Teknik Analisis Uji Coba Instrumen

Uji coba intrumen berkaitan dengan kualitas dari informasi/data-data yang dikumpulkan ditentukan oleh kualitas alat pengambil data (instrumen) dan pengumpul data (surveyor). Mengingat pentingnya kualitas alat pengambil data maka instrumen yang digunakan harus teruji dari segi validitas dan reliabilitasnya. Responden yang terpilih untuk melakukan ujicoba sebanyak 20 orang.

1. Validitas

Validitas instrumen adalah tingkat keabsahan atau ketepatan suatu instrumen (Syambasri, 2001). Arikunto (1995) menyatakan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau keshahihan suatu alat ukur. Jika instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid dengan demikian instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2004). Dengan demikian instrumen yang valid adalah instrumen yang benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Validitas item dari suatu alat ukur adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh satu butir item (yang merupakan bagian tak terpisahkan dari instrumen sebagai suatu totalitas) dalam mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir item tersebut. Untuk mengetahui validitas item dari suatu instrumen dapat menggunakan suatu teknik kolerasi *product momen* dengan angka kasar yang dikemukakan oleh Pearson, sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

(Karno To, 1996)

Dengan :

r_{xy} = koefisien korelasi antara variabel X dan Y

X = skor tiap butir soal.

Y = skor total tiap butir soal.

N = jumlah siswa.

Untuk menginterpretasikan nilai koefisien korelasi yang diperoleh dari perhitungan di atas, digunakan kriteria validitas instrumen seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.3. di bawah ini:

Tabel 3.3
Interpretasi Validitas Instrumen

Koefisien Korelasi	Kriteria validitas
$0,80 < r \leq 1,00$	Sangat tinggi
$0,60 < r \leq 0,80$	Tinggi
$0,40 < r \leq 0,60$	Cukup
$0,20 < r \leq 0,40$	Rendah
$0,00 < r \leq 0,20$	Sangat rendah

(Arikunto, 2003 :75)

Berdasarkan hasil perhitungan ujicoba instrumen dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment diperoleh butir soal yang tidak valid (*drop*) yaitu nomor; 29, 36, dan 44.

2. Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas instrumen merupakan ukuran yang menyatakan konsistensi alat ukur yang digunakan. Arikunto (2003 : 154) menyatakan bahwa

reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan suatu instrumen. Suatu instrumen dapat mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika instrumen tersebut dapat memberikan hasil yang tetap.

Teknik yang digunakan untuk menentukan reliabilitas instrumen dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan menggunakan rumus Alpha (*cronbach α*). Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sum \sigma_t^2} \right)$$

(Karno To, 1996:6)

Dengan :

r_{11} = koefisien reliabilitas instrumen

n = banyaknya item soal

$\sum \sigma_i^2$ = jumlah varians skor tiap-tiap item

$$\sigma^2 = \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}}{N}$$

Dengan:

σ = varians yang dicari

X = skor butir soal

N = jumlah siswa

σ_t^2 = varians total

$$\sigma_t^2 = \frac{\sum Y_t^2 - \frac{(\sum Y_t)^2}{N}}{N}$$

Dengan:

$\sum Y_t^2$ = jumlah kuadrat skor total

$(\sum Y_t)^2$ = jumlah skor total dikuadratkan

N = jumlah siswa

Adapun tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas instrumen yang diperoleh digunakan Tabel 3.4 seperti berikut ini:

Tabel 3.4
Interpretasi Reliabilitas

Koefisien Korelasi	Kriteria reliabilitas
$0,81 \leq r \leq 1,00$	Sangat tinggi
$0,61 \leq r \leq 0,80$	Tinggi
$0,41 \leq r \leq 0,60$	Cukup
$0,21 \leq r \leq 0,40$	Rendah
$0,00 \leq r \leq 0,20$	Sangat rendah

(Arikunto, 2003:75)

Sementara hasil perhitungan dengan rumus Alpha Cronbach diperoleh nilai sebesar 0,935; yang berarti instrumen memiliki reliabilitas sangat tinggi.

3.5. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian telah diupayakan dan dikontrol agar hasilnya dapat diterima kebenarannya secara ilmiah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang ingin dicapai. Namun berbagai kekurangan dan kelemahan sebagai akibat keterbatasan penelitian yang ada, merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dihindarkan dan dikendalikan diantaranya penelitian ini hanya menggunakan sampel kecil yaitu sebanyak 9 (sembilan) sekolah yang ada di Kabupaten Gresik Jawa Timur, juga memiliki beberapa keterbatasan diantaranya waktu, tenaga dan keterbatasan jangkauan penelitian. Keterbatasan jangkauan penelitian menyebabkan informasi yang menjadi fokus penelitian tidak didapat dari semua wilayah yang menjadi obyek penelitian, sehingga tidak semua wilayah atau kabupaten yang menjadi obyek penelitian dapat diperoleh informasi. Daerah penelitian dalam instrumen ini hanya meliputi wilayah Kabupaten Gresik penerima bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, meliputi sekolah penerima bantuan yaitu SMPN 1 Driyorejo, SMPN 4 Gresik, SMPN 1 Balongpanggang, SMPN 1 Menganti, SMP

Sunan Giri, SMPN 2 Gresik, SMPN 4 Gresik, SMP Sunan Ampel, SMP PGRI Kedamean dan SMP YPM 5 Gresik. Meskipun demikian informasi yang dikehendaki dalam penelitian ini sudah cukup tergali sehingga sudah dapat menjawab pertanyaan penelitian dalam instrumen ini.

Keterbatasan metodologis penelitian adalah sebagai berikut, penelitian tentang akuntabilitas pembangunan ruang laboratorium IPA SMP dilakukan dengan metode survey tidak dibandingkan dengan metode lain, sehingga metode penelitian survey deskriptif analitis terhadap kualitas akuntabilitas pembangunan ruang laboratorium IPA SMP. Selain itu fokus penelitian ini adalah masalah akuntabilitas pembangunan ruang laboratorium IPA SMP tidak dibandingkan dengan pembangunan ruang lainnya sehingga pembahasan permasalahan penelitian hanya terkait dengan fokus penelitian yaitu akuntabilitas dalam pembangunan ruang laboratorium IPA SMP.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN MASALAH

Pada Bab ini disajikan deskripsi dan interpretasi hasil penelitian tentang gambaran akuntabilitas pelaksanaan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP di Kabupaten Gresik Jawa Timur. Hal-hal pokok yang disajikan dalam deskripsi hasil penelitian terdiri atas dua bagian. *Pertama* menyajikan deskripsi data dan pembahasan hasil angket tanggapan responden penelitian tentang akuntabilitas yang meliputi tujuh komponen akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP di Kabupaten Gresik Jawa Timur yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Kedua, data dan hasil observasi dan wawancara keterlaksanaan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP. Deskripsi hasil-hasil penelitian disajikan berupa rata-rata tanggapan berbagai responden disertai pembahasannya untuk masing-masing komponen akuntabilitas pelaksanaan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP di Kab Gresik Provinsi Jawa Timur, kemudian dilengkapi dengan pembahasan hasil wawancara.

4.1. Pembahasan Umum Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian datanya berasal dari 9 sekolah di kabupaten Gresik Jawa Timur, dan tiap-tiap sekolah melibatkan sebanyak 8 orang responden yang berasal dari unsur sekolah maupun di luar sekolah yaitu: Kepala Sekolah, Ketua Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), Sekretaris P2S, Bendahara P2S, Guru, Komite Sekolah, dan Orang Tua/Wali Siswa sebanyak 2 orang, sehingga responden totalnya ada 72 orang, dengan rincian sebagai berikut; 20 orang untuk ujicoba instrumen dan 52 orang untuk sampel penelitian

Mengingat akuntabilitas merupakan suatu evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya ataupun sudah berada jauh di luar tanggungjawab dan kewenangannya maka terdapat 4 (empat) dimensi yang selalu melekat dalam akuntabilitas yaitu siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas; kepada siapa dia berakuntabilitas; apa

standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitasnya; dan berapa nilai akuntabilitas itu sendiri.

Asas Akuntabilitas menyatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan. Itulah sebabnya permasalahan akuntabilitas pelaksanaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP ini meliputi 4 faktor yaitu: faktor perencanaan, faktor pelaksanaan, faktor pengawasan dan faktor dukungan ataupun hambatan pada program tersebut, dimana pada ke-empat faktor tersebut mengandung juga mengenai keuangan, kebermanfaatan dan prosedural, yang sesuai dengan buku Panduan Pelaksanaan dan Teknis Program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tahun 2010.

4.2. Analisa Data dan Pembahasan Masalah

Membahas permasalahan penelitian yang pertama, yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, dimulai dari menghitung rerata skor setiap dimensi melalui indikator pencapaian yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, Skor rerata ini diperoleh dari skor instrumen penelitian pada kedelapan responden yang berasal dari sembilan sekolah di kabupaten Gresik Jatim. Data awal ditafsirkan secara kuantitatif sehingga dapat dilakukan perhitungan secara numerik, dari hasil perhitungan ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode grafik dan prosentase sehingga dapat diperoleh kesimpulan secara kualitatifnya. Acuan interpretasi nilai skor yang dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas program adalah seperti yang telah dikemukakan pada Tabel 3.1. yang ada pada Bab III.

Secara rinci analisis data penelitian dan pembahasan permasalahannya adalah sebagai berikut:

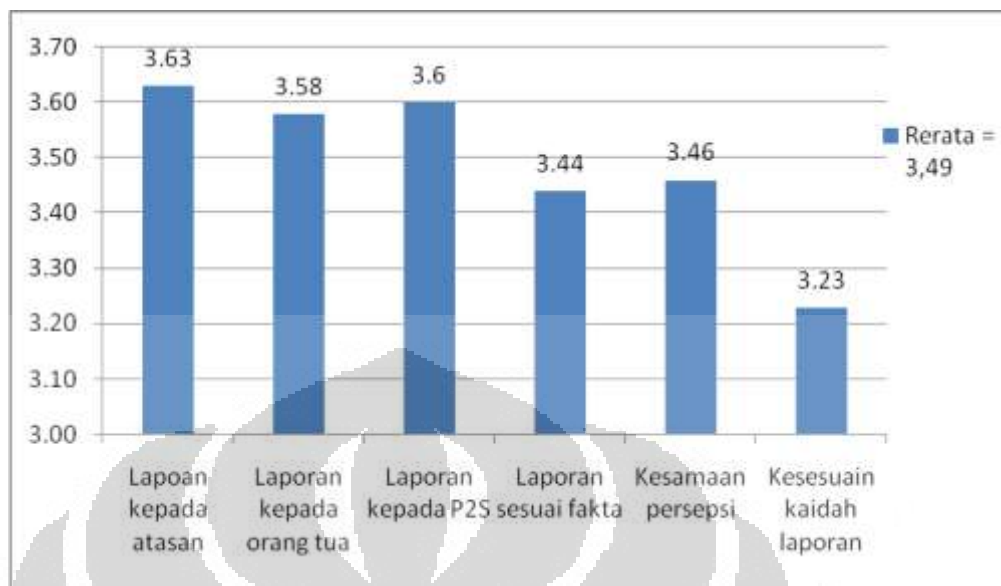
4.2.1. Pengukuran Akuntabilitas melalui Dimensi Pengungkapan Tujuan (*Intentions Disclosure*)

Data yang terjaring dari instrumen penelitian adalah sebanyak 52 responden dan masing-masing responden telah menjawab 42 item pernyataan, dari data ini kemudian ditabulasi dan dikelompokkan berdasarkan dua indikator, hasil dari tabulasi data yang sudah dikelompokkan kemudian dihitung nilai reratanya untuk masing masing responden dari ke-sembilan sekolah yang menjadi sampel penelitian. Hasil tabulasi data dan perhitungan skor rerata dari setiap indikator ada pada bagian lampiran, adapun data hasil perhitungannya adalah seperti pada Tabel 4.1. sebagai berikut:

Tabel 4.1
Nilai Rerata Dimensi Pengungkapan Tujuan (*Intentions Disclosure*)

Nomor Indikator	Nomor Instrumen	Rerata	Prosentase (%)
c) Indikator 1 (menyampaikan laporan kepada publik)	1 (laporan kepada atasan)	3,63	72,7
	2 (laporan kepada orang tua)	3,58	71,5
	3 (laporan kepada P2S)	3,60	71,9
Indikator 2 (laporan bermanfaat, adil dan wajar)	4 (laporan sesuai fakta)	3,44	68,8
	5 (sama persepsi)	3,46	69,2
	6 (sesuai kaidah laporan)	3,23	64,6
	Rerata	3,49	69,8

Jika data rerata dari ke-6 instrumen soal yang terkait dengan akuntabilitas tersebut dibuat dalam bentuk diagram, maka akan tampak seperti pada Gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1. Diagram Dimensi Pengungkapan Tujuan (*Intentions Disclosure*)

Berdasarkan data pada Tabel 4.1. menunjukkan bahwa nilai rerata keenam instrumen soal yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP di kabupaten Gresik adalah 3,49 atau 69,8% yang berarti akuntabilitasnya tergolong *tinggi*. Akuntabilitas dengan kategori tinggi dapat dimaknai bahwa para pelaksana program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, telah memiliki niat atau keinginan (*Intentions*) yang kuat untuk memberikan pengungkapan (*Disclosure*) laporan yang jelas kepada stakeholder. Juga berdasarkan Gambar 4.1. tampak bahwa tidak semua instrumen soal nilai reratanya sama, tetapi ada yang memiliki rerata tertinggi yaitu 3,63 (72,7%) pada instrumen soal nomor 1, yang berarti dapat dimaknai bahwa telah dilaksanakan laporan pertanggung jawaban panitia pembangunan sekolah (P2S) kepada pihak terkait khususnya Direktorat Pembinaan SMP (PSMP), sementara itu nilai rerata terkecil yaitu 3,23 (64,6%) yaitu pada instrumen soal nomor 6; hasil tersebut dapat dimaknai bahwa pelaporan yang telah dibuat sesuai dengan kaidah pelaporan yang kurang jelas, artinya rujukan yang digunakan tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang digunakan oleh Direktorat PSMP. Sementara itu instrumen soal

nomor 2,3,4,dan 5 memiliki nilai mendekati nilai rerata sebesar 3,49 (69,8%); hasil ini dapat dimaknai bahwa pada instrumen soal tersebut pelaporan pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban tersebut tidak menimbulkan dua persepsi. Jika hal ini terjadi dapat mengakibatkan atau menimbulkan kecurigaan dari pihak stakeholder.

Secara umum dikatakan bahwa tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, di Kabupaten Gresik tergolong tinggi sebesar 69,8%. Ini berarti bahwa pada umumnya pelaksanaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP di kabupaten Gresik Jawa Timur adalah akuntabel

4.2.2. Pengukuran Akuntabilitas melalui Dimensi Kemampuan Mengarahkan Pikiran yang Jelas (*Directing Mind Visibility*)

Data yang terjaring dari instrumen penelitian adalah sebanyak 52 responden dan masing-masing responden telah menjawab 42 item pernyataan, dari data ini kemudian ditabulasi dan dikelompokkan berdasarkan dua indikator, hasil dari tabulasi data yang sudah dikelompokkan kemudian dihitung nilai reratanya untuk masing masing responden dari ke-sembilan sekolah yang menjadi sampel penelitian. Hasil tabulasi data dan perhitungan skor rerata dari setiap indikator ada pada bagian lampiran, adapun data hasil perhitungannya adalah seperti pada Tabel 4.2. sebagai berikut:

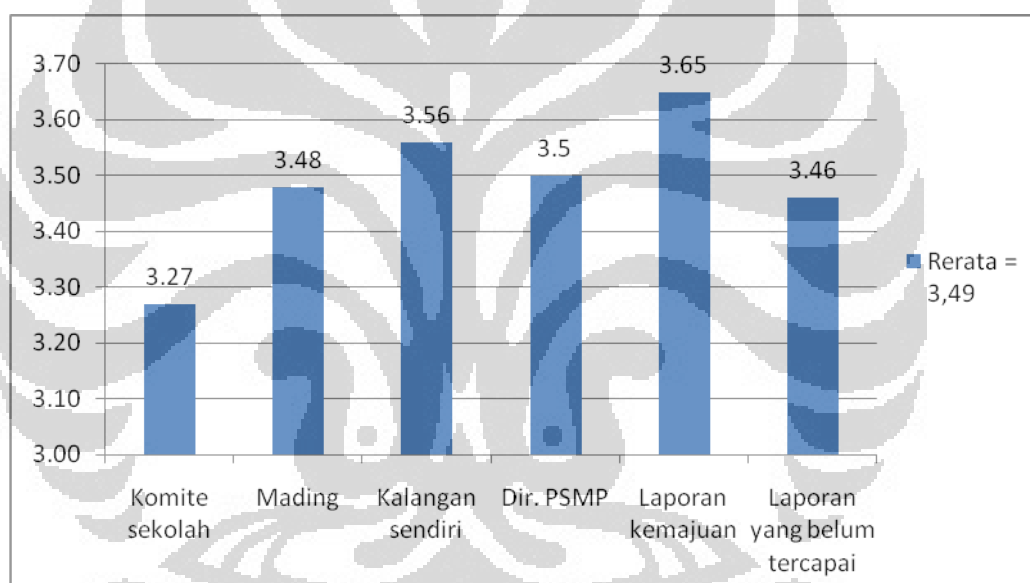
Tabel 4.2

Nilai Rerata Dimensi Kemampuan Mengarahkan Pikiran yang Jelas (*Directing Mind Visibility*)

Nomor Indikator	Nomor Instrumen	Rerata	Prosentase (%)
Indikator 1 (laporan harus dipublikasikan)	7 (komite sekolah)	3,27	65,4
	8 (mading)	3,48	69,6

	9 (kalangan sendiri)	3,56	71,2
Indikator 2 (melaporkan kegiatan yang telah dilakukan atau gagal dilaksanakan)	10 (Dir. PSMP)	3,50	70,0
	11 (laporan kemajuan)	3,65	73,1
	12 (laporan yang belum tercapai)	3,46	69,2
	Rerata	3,49	69,7

Jika data rerata dari keenam instrumen soal yang terkait dengan akuntabilitas tersebut dibuat dalam bentuk diagram, maka akan tampak seperti pada Gambar 4.2. berikut:



Gambar 4.2. Diagram Dimensi Kemampuan Mengarahkan Pikiran yang Jelas (*Directing Mind Visibility*)

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai rerata keenam instrumen soal yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMPdi kabupaten Gresik adalah 3,49 atau 69,7% yang berarti akuntabilitasnya tergolong *tinggi*. Akuntabilitas dengan kategori tinggi dapat dimaknai bahwa semua panitia pembangunan sekolah (P2S), khususnya ketua panitia telah memiliki kemampuan dalam mengarahkan semua kemampuan pikiran ke arah yang jelas (*Directing Mind Visibility*) sesuai dengan rencana yang

telah dibentuk sebelumnya. Juga berdasarkan Gambar 4.2. tampak bahwa tidak semua instrumen soal nilai reratanya sama, tetapi ada yang memiliki rerata tertinggi yaitu 3,65 (73,1%) pada instrumen soal nomor 11, yang berarti dapat dimaknai bahwa panitia pembangunan sekolah (P2S) telah memberikan laporan pertanggung jawaban kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP yang telah dilaksanakan kepada pihak Direktorat PSMP, artinya bahwa panitia pembangunan sekolah (P2S) tidak mengesampingkan kewajibannya memberikan laporan kepada Direktorat PSMP sebagai badan pemberi bantuan kepada sekolah yang berhak menerimanya, sementara itu nilai rerata terkecil diperoleh sebesar 3,27 (65,4%) yaitu pada instrumen soal nomor 7, hal ini dapat dimaknai bahwa panitia telah memberikan laporan pertanggung jawaban dan dipublikasikan melalui dinas pendidikan, Direktorat PSMP, media sekolah/mading, ketua komite dan orang tua siswa, satu hal yang dapat ditafsirkan bahwa sedikit sekali lembaga atau organisasi yang akan mempublikasikan laporannya secara terbuka ke masyarakat, hal ini berkaitan dengan rasa enggan untuk mendapat kritikan dari masyarakat. Sementara itu instrumen soal nomor 8,9,10,dan 12 memiliki nilai mendekati nilai rerata sebesar 3,49 (69,8%); hasil ini dapat dimaknai bahwa pada instrumen soal tersebut pelaporan pertanggungjawaban telah dipublikasikan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait seperti Direktorat PSMP, Kantor Dinas Pendidikan Nasional setempat, pihak komite dan orang tua siswa. Jika hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan serta tegaknya sistem transparansi

Secara umum dikatakan bahwa tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, di kabupaten Gresik tergolong tinggi sebesar 69,7%. Ini berarti bahwa pada umumnya pelaksanaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP di Kabupaten Gresik Jawa Timur adalah akuntabel

4.2.3. Pengukuran Akuntabilitas melalui Dimensi Unjuk Kerja Nyata (*Performance Visibility*)

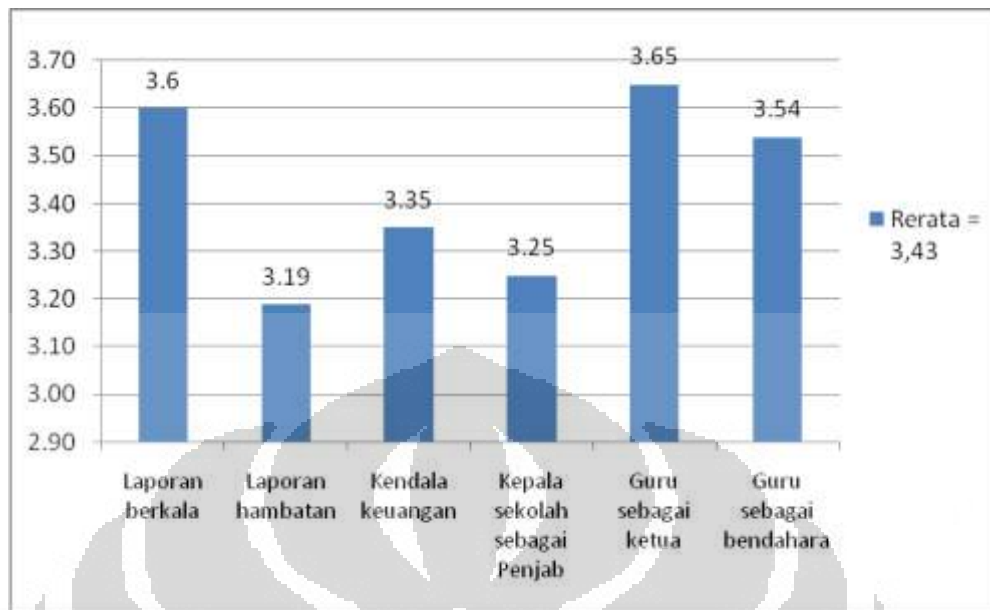
Data yang terjaring dari instrumen penelitian adalah sebanyak 52 responden dan masing-masing responden telah menjawab 42 item pernyataan, dari data ini kemudian ditabulasi dan dikelompokkan berdasarkan dua indikator, hasil dari tabulasi data yang sudah dikelompokkan kemudian dihitung nilai reratanya untuk masing masing responden dari ke-sembilan sekolah yang menjadi sampel penelitian. Hasil tabulasi data dan perhitungan skor rerata dari setiap indikator ada pada bagian lampiran, adapun data hasil perhitungannya adalah seperti pada Tabel 4.3. sebagai berikut:

Tabel 4.3

Nilai Rerata Dimensi Unjuk Kerja Nyata (*Performance Visibility*)

Nomor Indikator	Nomor Instrumen	Rerata	Prosentase (%)
Indikator 1 (mengungkap kinerja aktual)	13 (laporan berkala)	3,60	71,9
	14 (laporan hambatan)	3,19	63,8
	15 (kendala keuangan)	3,35	66,9
Indikator 2 (semua pihak memberikan akuntabilitas untuk semua kegiatan)	16 (kepala sekolah sebagai penanggungjawab)	3,25	65,0
	17 (guru sebagai ketua)	3,65	73,1
	18 (guru sebagai bendahara)	3,54	70,8
	Rerata	3,43	68,6

Jika data rerata dari keenam instrumen soal yang terkait dengan akuntabilitas tersebut dibuat dalam bentuk diagram, maka akan tampak seperti pada Gambar 4.3. berikut:



Gambar 4.3. Diagram Dimensi Unjuk Kerja Nyata (*Performance Visibility*)

Berdasarkan data pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai rerata keenam instrumen soal yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMPdi kabupaten Gresik adalah 3,43 atau 68,6% yang berarti akuntabilitasnya tergolong *tinggi*. Akuntabilitas dengan kategori tinggi dapat dimaknai bahwa semua panitia pembangunan sekolah (P2S), telah melakukan unjuk kerja nyata (*Performance Visibility*) yaitu telah memberikan laporan berdasarkan pada penggunaan anggaran yang jelas. Juga berdasarkan Gambar 4.3 tampak bahwa tidak semua instrumen soal nilai reratanya sama, tetapi ada yang memiliki rerata tertinggi yaitu 3,65 (73,1%) pada instrumensoal nomor 17, yang berarti dapat dimaknai bahwa guru sebagai ketua kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP memberikan laporan akuntabilitas kepada panitia pembangunan sekolah (P2S), hal ini adalah benar mengingat ketua panitia harus memberikan laporannya kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP. Kepala sekolah dapat meneruskan laporan tersebut kepada instansi terkait (Direktorat PSMP) sebagai pemberi dana bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, sementara itu nilai

rerata terkecil diperoleh sebesar 3,19 (63,8%) yaitu pada instrumen soal nomor 14, hasil tersebut dapat dimaknai bahwa Kepala sekolah memberikan laporan tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, seharusnya yang memberikan laporan hambatan-hambatan yang terjadi dalam bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP adalah ketua panitia, sedangkan kepala sekolah bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dalam bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP dan kepala sekolah sebagai orang pengambil kebijakan atau keputusan pada sektor yang sangat strategis. Sementara itu instrumen soal nomor 13, 15, 16, dan 18 memiliki nilai mendekati nilai rerata sebesar 3,43 (68,6%); hasil ini dapat dimaknai bahwa pada instrumen soal tersebut pelaporan pertanggungjawaban telah memberikan pelaporan pertanggungjawaban secara berkala, juga memberikan pelaporan pertanggungjawaban terkait dengan hambatan yang dihadapi panitia serta melaporkan pertanggungjawaban mengenai perkembangan yang telah dicapai

Secara umum dikatakan bahwa tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, di kabupaten Gresik tergolong tinggi sebesar 68,6%. Ini berarti bahwa pada umumnya pelaksanaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP di kabupaten Gresik, Jawa Timur adalah akuntabel

4.2.4. Pengukuran Akuntabilitas melalui Dimensi Menjawab Tindakan Pencegahan (*Answering for Precaution Taken*)

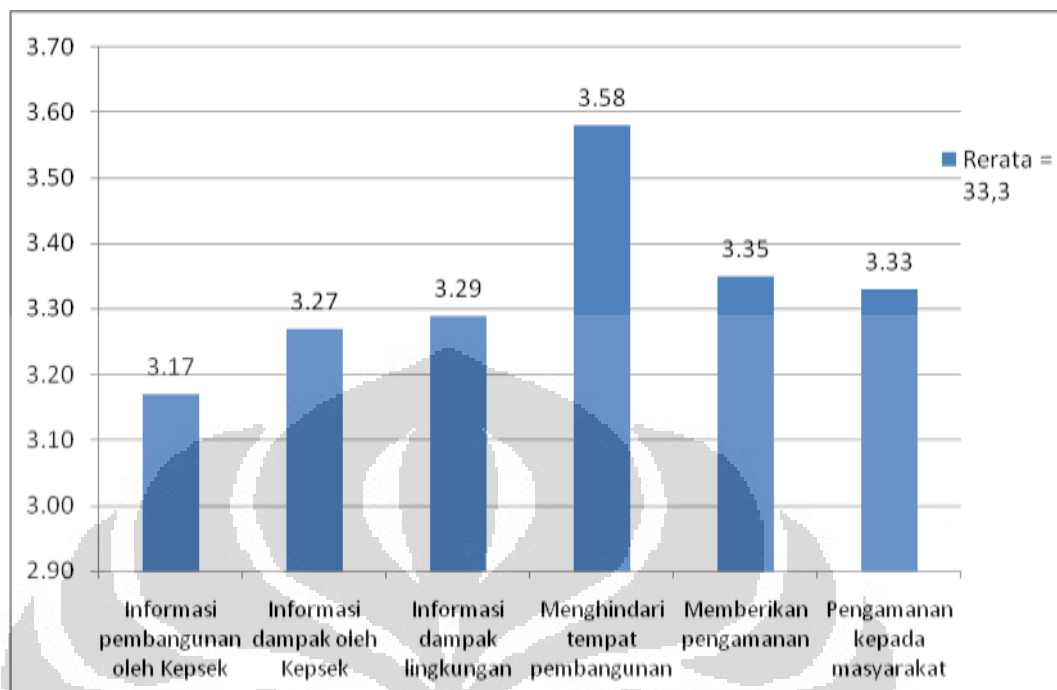
Data yang terjaring dari instrumen penelitian adalah sebanyak 52 responden dan masing-masing responden telah menjawab 42 item pernyataan, dari data ini kemudian ditabulasi dan dikelompokkan berdasarkan dua indikator, hasil dari tabulasi data yang sudah dikelompokkan kemudian dihitung nilai reratanya untuk masing-masing responden dari ke-sembilan sekolah yang menjadi sampel penelitian. Hasil

tabulasi data dan perhitungan skor rerata dari setiap indikator ada pada bagian lampiran, adapun data hasil perhitungannya adalah seperti pada Tabel 4.4. sebagai berikut:

Tabel 4.4
Nilai Rerata Dimensi *Menjawab Tindakan Pencegahan* (Answering for Precaution Taken)

Nomor Indikator	Nomor Instrumen	Rerata	Prosentase (%)
Indikator 1 (para pengambil keputusan memberikan informasi tentang resiko keselamatan masyarakat, keadilan hukum dan lingkungan)	19 (kepala sekolah memberikan informasi tentang pembangunan)	3,17	63,5
	20 (kepala sekolah memberikan informasi tentang dampak)	3,27	65,4
	21 (kepala sekolah memberikan informasi dampak terhadap lingkungan)	3,29	65,8
Indikator 2 (para pengambil keputusan memberikan informasi tentang sesuatu yang dapat dilakukan untuk menghindari atau meminimalkan resiko tersebut)	22 (menghindari tempat pembangunan)	3,58	71,5
	23 (memberikan pengamanan)	3,35	66,9
	24 (pengamanan kepada masyarakat)	3,33	66,5
	Rerata	3,33	66,5

Jika data rerata dari keenam instrumen soal yang terkait dengan akuntabilitas tersebut dibuat dalam bentuk diagram, maka akan tampak seperti pada Gambar 4.4. berikut:



Gambar 4.4. Diagram Dimensi Menjawab Tindakan Pencegahan (*Answering for Precaution Taken*)

Berdasarkan data pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai rerata keenam instrumen soal yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP di kabupaten Gresik adalah 3,62 atau 66,6% yang berarti akuntabilitasnya tergolong tinggi. Akuntabilitas dengan kategori tinggi dapat dimaknai bahwa semua panitia pembangunan sekolah (P2S), telah memberikan jawaban berbentuk laporan atas permintaan pemberi bantuan *blockgrand* yaitu Direktorat PSMP, dengan memberikan jawaban secara nyata/ riil atas apa yang telah dilakukan sesuai dengan program yang telah ditentukan, hal ini berarti telah menjawab atas tindakan pencegahan (*Answering for Precaution Taken*) yang akan dilakukan oleh siapa saja termasuk panitia pembangunan sekolah. Juga berdasarkan Gambar 4.4. tampak bahwa tidak semua instrumen soal nilai reratanya sama, tetapi ada yang memiliki rerata tertinggi yaitu 3,58 (71,5%) pada instrumen soal nomor 22, yang berarti dapat dimaknai bahwa Kepala sekolah telah memberikan informasi kepada masyarakat setempat untuk menghindari tempat bantuan

pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, artinya dengan pemberitahuan tersebut dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan, baik dari pihak yang mengerjakan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP tersebut, maupun dari pihak masyarakat, sementara itu nilai rerata terkecil diperoleh sebesar 3,17 (63,5%) yaitu pada instrumen soal nomor 19, hal ini dapat dimaknai bahwa Kepala sekolah telah memberikan informasi kepada masyarakat setempat mengenai bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, dengan kata lain informasi yang dimaksudkan kurang jelas maknanya, seharusnya informasi yang diberikan jelas dan operasional. Sementara itu instrumen soal nomor 20,21,23,dan 24 memiliki nilai mendekati nilai rerata sebesar 3,62 (66,6%); hasil ini dapat dimaknai bahwa pada instrumen soal tersebut panitia pembangunan sekolah (P2S) telah memberikan informasi kepada masyarakat sekitar perihal bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, juga telah diinformasikan agar masyarakat sekitar untuk memberikan peran serta dalam menjaga keamanan terhadap bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP.

Secara umum dikatakan bahwa tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, di kabupaten Gresik tergolong tinggi sebesar 66,6%. Ini berarti bahwa pada umumnya pelaksanaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP di kabupaten Gresik Jawa Timur adalah akuntabel

4.2.5. Pengukuran Akuntabilitas melalui Dimensi Pertanggungjawaban untuk Kejujuran dan Kesahannya (*Accountability for Probit and Legality*)

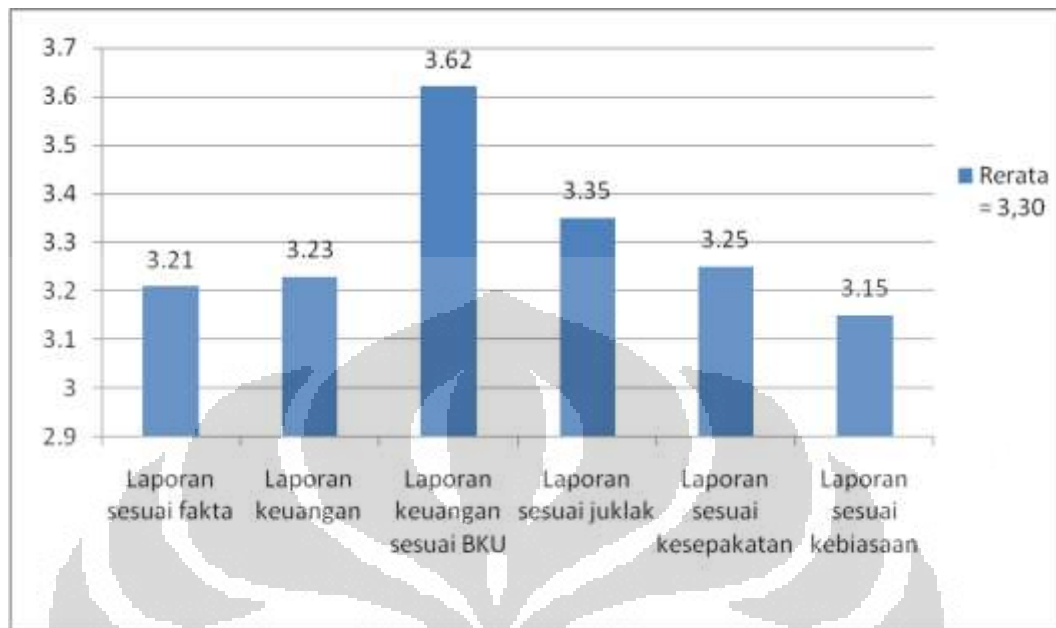
Data yang terjaring dari instrumen penelitian adalah sebanyak 52 responden dan masing-masing responden telah menjawab 42 item pernyataan, dari data ini kemudian ditabulasi dan dikelompokkan berdasarkan dua indikator, hasil dari tabulasi data yang sudah

dikelompokkan kemudian dihitung nilai reratanya untuk masing masing responden dari ke-sembilan sekolah yang menjadi sampel penelitian. Hasil tabulasi data dan perhitungan skor rerata dari setiap indikator ada pada bagian lampiran, adapun data hasil perhitungannya adalah seperti pada Tabel 4.5. sebagai berikut:

Tabel 4.5
Nilai Rerata Indikator Dimensi Pertanggungjawaban untuk Kejujuran dan Kesahannya (*Accountability for Probity and Legality*)

Nomor Indikator	Nomor Instrumen	Rerata	Prosentase (%)
Indikator 1 (penghindaran dari penyalahgunaan jabatan)	25 (laporan sesuai fakta)	3,21	64,2
	26 (laporan keuangan)	3,23	64,6
	27 (laporan keuangan sesuai BKU)	3,62	72,3
Indikator 2 (kepatuhan birokrat terhadap hukum dan jaminan penegakan hukum serta peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumberdaya publik)	28 (laporan sesuai juklak)	3,35	66,9
	30 (laporan sesuai kesepakatan)	3,25	65,0
	43 (laporan sesuai kebiasaan)	3,15	63,1
	Rerata	3,30	66,0

Jika data rerata dari keenam instrumen soal yang terkait dengan akuntabilitas tersebut dibuat dalam bentuk diagram, maka akan tampak seperti pada Gambar 4.5. berikut:



Gambar 4.5. Diagram Dimensi Pertanggungjawaban untuk Kejujuran dan Kesahannya (*Accountability for Probitiy and Legality*)

Berdasarkan data pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai rerata keenam instrumen soal yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP di kabupaten Gresik adalah 3,30 atau 66,0% yang berarti akuntabilitasnya tergolong *tinggi*.

Akuntabilitas dengan kategori tinggi dapat dimaknai bahwa panitia pembangunan sekolah (P2S) telah memberikan pertanggung jawaban secara jujur dan sah (*Accountability for Probitiy and Legality*) menurut tata aturan yang berlaku, karena laporan pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan kaidah pelaporan. Juga berdasarkan Gambar 4.5. tampak bahwa tidak semua instrumen soal nilai reratanya sama, tetapi ada yang memiliki rerata tertinggi yaitu 3,62 (72,3%) pada instrumen soal nomor 27, yang berarti dapat dimaknai bahwa guru sebagai bendahara kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP telah memberikan laporan keuangan sesuai dengan laporan buku kas umum (BKU). Dengan kata lain bahwa pelaporan pertanggung jawaban

(akuntabilitas) harus memiliki pedoman yang jelas sehingga dalam memberikan laporannya tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan administratif, sementara itu instrumen soal dengan nilai rerata terkecil diperoleh sebesar 3,15 (63,1%) yaitu pada instrumen soal nomor 43, hal ini dapat dimaknai bahwa Panitia pembangunan sekolah (P2S) melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, telah memberikan laporan akuntabilitas sesuai dengan kebiasaan yang ada, jika diamati bahwa memiliki nilai rerata yang kecil, responden kurang yakin dengan pelaporan yang bersifat biasa tersebut, artinya jika pelaporan kegiatan tidak merujuk kepada salah satu petunjuk pelaksanaan yang ada maka akan muncul kesalahan. Sementara itu instrumen soal nomor 25,26,28 dan 30 memiliki nilai mendekati nilai rerata sebesar 3,30 (66,0%); hasil ini dapat dimaknai bahwa pada instrumen soal tersebut panitia pembangunan sekolah (P2S) telah memberikan pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, juga telah memberikan pelaporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan buku kas umum (BKU) serta memberikan pelaporan pertanggungjawaban mengenai akuntabilitas sesuai dengan peraturan pemerintah.

Secara umum dikatakan bahwa tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, di kabupaten Gresik tergolong tinggi sebesar 66,0%. Ini berarti bahwa pada umumnya pelaksanaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP di kabupaten Gresik Jawa Timur adalah akuntabel

4.2.6. Pengukuran Akuntabilitas melalui Dimensi Proses Pertanggungjawaban (*Process Accountability*)

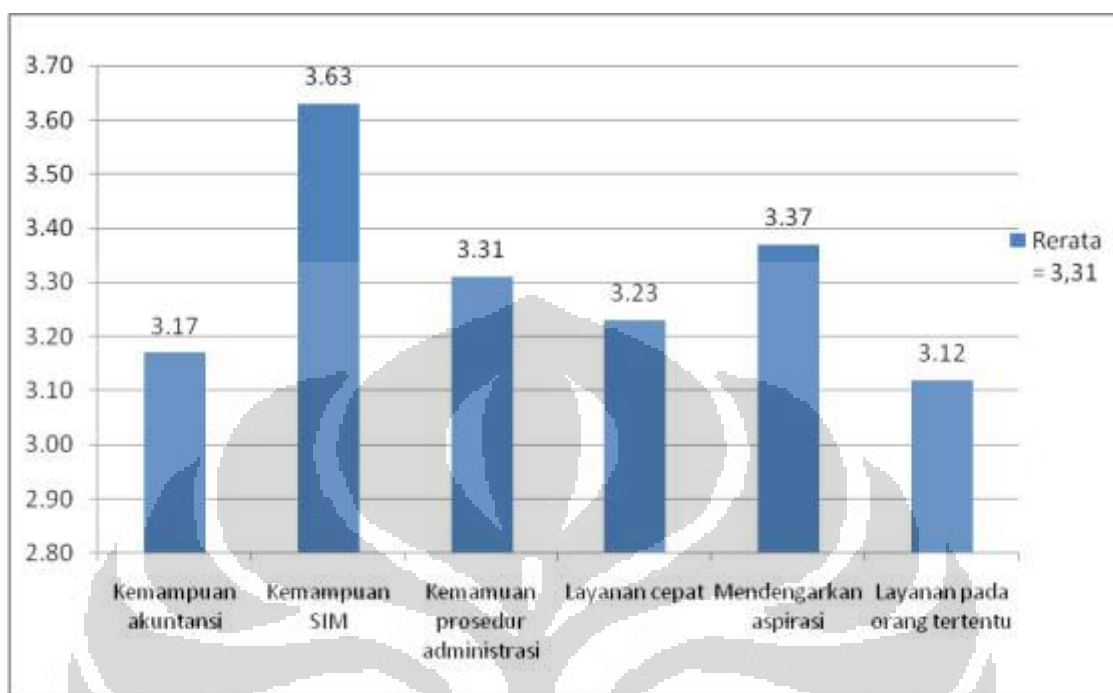
Data yang terjaring dari instrumen penelitian adalah sebanyak 52 responden dan masing-masing responden telah menjawab 42 item pernyataan, dari data ini kemudian ditabulasi dan dikelompokkan berdasarkan dua indikator, hasil dari tabulasi data yang sudah dikelompokkan kemudian dihitung nilai reratanya untuk masing masing

responden dari ke-sembilan sekolah yang menjadi sampel penelitian. Hasil tabulasi data dan perhitungan skor rerata dari setiap indikator ada pada bagian lampiran, adapun data hasil perhitungannya adalah seperti pada Tabel 4.6. sebagai berikut:

Tabel 4.6
Nilai Rerata Dimensi Proses Pertanggungjawaban (*Process Accountability*)

Nomor Indikator	Nomor Instrumen	Rerata	Prosentase (%)
Indikator 1 (kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi)	31 (kemampuan akuntansi)	3,17	63,5
	32 (kemampuan SIM)	3,63	72,7
	33 (kemampuan prosedur administrasi)	3,31	66,2
Indikator 2 (pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya)	34 (layanan cepat)	3,23	64,6
	35 (mendengarkan aspirasi)	3,37	67,3
	45 (layanan pada orang tertentu)	3,12	62,3
	Rerata	3,31	66,1

Jika data rerata dari keenam instrumen soal yang terkait dengan akuntabilitas tersebut dibuat dalam bentuk diagram, maka akan tampak seperti pada Gambar 4.6. berikut:



Gambar 4.6. Diagram Instrumen dengan Dimensi Proses Pertanggungjawaban (*Process Accountability*)

Berdasarkan data pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai rerata keenam instrumen soal yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMPdi kabupaten Gresik adalah 3,31 atau 66,1% yang berarti akuntabilitasnya tergolong tinggi. Akuntabilitas dengan kategori tinggi dapat dimaknai bahwa panitia pembangunan sekolah (P2S) telah memberikan pertanggung jawaban sesuai dengan proses akuntabilitas (*Process Accountability*) artinya bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat sesuai dengan apa yang telah dikerjakan sesuai dengan perencanaan pembangunan ruang laboratoriu IPA. Juga berdasarkan Gambar 4.6.tampak bahwa tidak semua instrumen soal nilai reratanya sama, tetapi ada yang memiliki rerata tertinggi yaitu 3,63 (72,7%) pada instrumensoal nomor 32, yang berarti dapat dimaknai bahwa Panitia pembangunan sekolah (P2S) sebelum melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, telah memiliki kemampuan dalam sistem informasi manajemen,

dengan kata lain dalam mengelola suatu kegiatan panitia harus memahami dan mengerti tentang manajemen, terutam sistem informasi manajemen atau yang lazim disebut SIM, dengan memiliki kemampuan SIM, maka pengelolaan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, sementara itu instrumen soal dengan nilai rerata terkecil diperoleh sebesar 3,12 (62,3%) yaitu pada instrumen nomor 45, hal ini dapat dimaknai bahwa Panitia pembangunan sekolah (P2S) dalam melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, memberikan layanan informasi hanya kepada orang tertentu saja, ini dapat dimaknai bahwa terjadi sistem diskriminasi, karena seharusnya semua masyarakat dapat memperoleh atau boleh mengakses informasi yang diinginkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu instrumen soal nomor 31,33,34 dan 35 memiliki nilai mendekati nilai rerata sebesar 3,31 (66,1%); hasil ini dapat dimaknai bahwa pada instrumen soal tersebut panitia pembangunan sekolah (P2S) telah memiliki kemampuan dalam sistem informasi manajemen, juga telah memiliki kemampuan dalam prosedur administrasi serta siap untuk mendengarkan keluhan dari peserta yang terlibat dalam bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP.

Secara umum dikatakan bahwa tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, di kabupaten Gresik tergolong tinggi sebesar 66,1%. Ini berarti bahwa pada umumnya pelaksanaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP di kabupaten Gresik Jawa Timur adalah akuntabel

4.2.7. Pengukuran Akuntabilitas melalui Dimensi Program Pertanggungjawaban (Program Accountability)

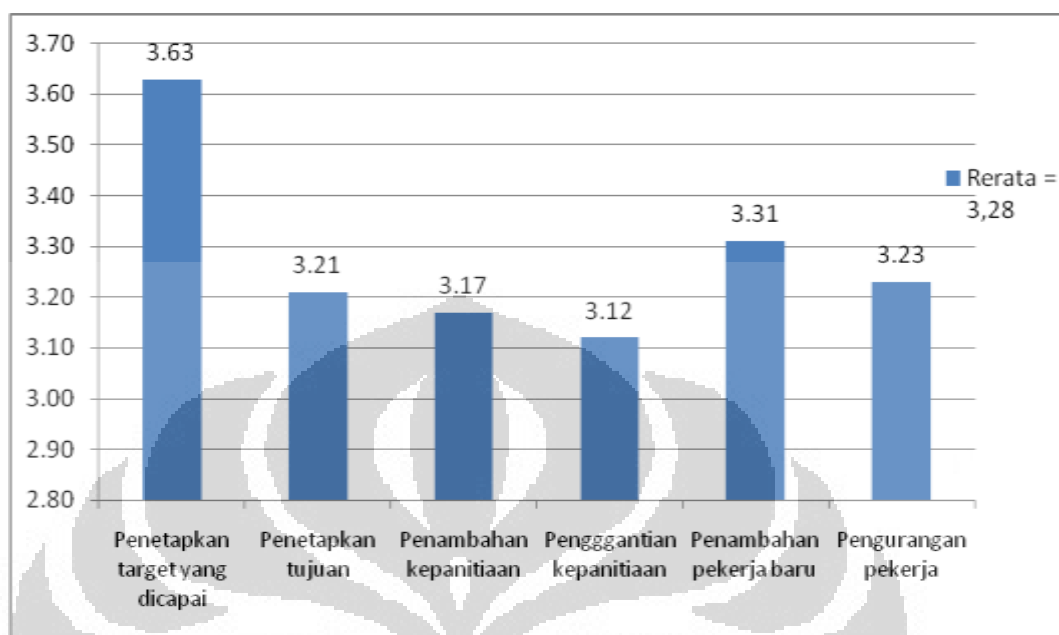
Data yang terjaring dari instrumen penelitian adalah sebanyak 52 responden dan masing-masing responden telah menjawab 42 item

pernyataan, dari data ini kemudian ditabulasi dan dikelompokkan berdasarkan dua indikator, hasil dari tabulasi data yang sudah dikelompokkan kemudian dihitung nilai reratanya untuk masing masing responden dari ke-sembilan sekolah yang menjadi sampel penelitian. Hasil tabulasi data dan perhitungan skor rerata dari setiap indikator ada pada bagian lampiran, adapun data hasil perhitungannya adalah seperti pada Tabel 4.7. sebagai berikut:

Tabel 4.7
Nilai Rerata Dimensi Program Pertanggungjawaban (*Program Accountability*)

Nomor Indikator	Nomor Instrumen	Rerata	Prosentase (%)
Indikator 1 (tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak)	37 (P2S menetapkan target yang dicapai)	3,63	72,7
	38 (P2S menetapkan tujuan)	3,21	64,2
	39 (menambah kepanitiaan)	3,17	63,5
Indikator 2 (mempertimbangkan alternatif program yang memberi hasil yang optimal dengan biaya yang minimal)	40 (mengganti kepanitiaan)	3,12	62,3
	41 (menambah pekerja baru)	3,31	66,2
	42 (mengurangi para pekerja)	3,23	64,6
	Rerata	3,28	66,5

Jika data rerata dari keenam instrumen soal yang terkait dengan akuntabilitas tersebut dibuat dalam bentuk diagram, maka akan tampak seperti pada Gambar 4.7. berikut:



Gambar 4.7. Diagram Instrumen dengan Dimensi Program Pertanggungjawaban (*Program Accountability*)

Berdasarkan data pada Tabel 4.7. menunjukkan bahwa nilai rerata keenam instrumen soal yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMPdi kabupaten Gresik adalah 3,28 atau 66,5% yang berarti akuntabilitasnya tergolong *tinggi*. Akuntabilitas dengan kategori tinggi dapat dimaknai bahwa panitia pembangunan sekolah (P2S) telah memberikan pertanggungjawaban telah memenuhi, sesuai dengan program akuntabilitas (*Program Accountability*), artinya bahwa laporan pertanggungjawaban merupakan suatu keharusan dalam era transparansi. Juga berdasarkan Gambar 4.7 tampak bahwa tidak semua instrumen soal nilai reratanya sama, tetapi ada yang memiliki rerata tertinggi yaitu 3,63 (72,7%) pada instrumen soal nomor 37, yang berarti dapat dimaknai bahwa Panitia pembangunan sekolah (P2S) dalam melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, telah menetapkan target yang harus dicapai, dengan kata lain bahwa dalam suatu kegiatan, ketua panitia harus memiliki target yang harus dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan

berdasarkan rapat kepanitiaan, karena jika pembangunan tersebut melebihi dari target, maka akan menimbulkan pembengkakan anggaran, sementara itu instrumen soal dengan nilai rerata terkecil diperoleh sebesar 3,12 (62,3%) yaitu pada instrumen soal nomor 40, hal ini dapat dimaknai bahwa Kepala sekolah sebagai penanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, akan mengganti kepanitiaan, jika kegiatan ini tidak tercapai sesuai tujuan, hal ini dapat dimaklumi, namun yang menjadi persoalan adalah apabila terjadinya penggantian atau perubahan panitia pembangunan sekolah (P2S) akan menambah beban pembiayaan serta akan menimbulkan persepsi bahwa kepala sekolah kurang pandai dalam mempengaruhi bawahannya. Sementara itu instrumen soal nomor 38,39,41 dan 42 memiliki nilai mendekati nilai rerata sebesar 3,28 (66,5%); hasil ini dapat dimaknai bahwa pada instrumen soal tersebut panitia pembangunan sekolah (P2S) telah menetapkan tujuan dan target yang ingin dicapai, dalam bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP.

Secara umum dikatakan bahwa tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, di kabupaten Gresik tergolong tinggi sebesar 66,5%. Ini berarti bahwa pada umumnya pelaksanaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP di kabupaten Gresik, Jawa Timur adalah akuntabel.

4.2.8. Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA

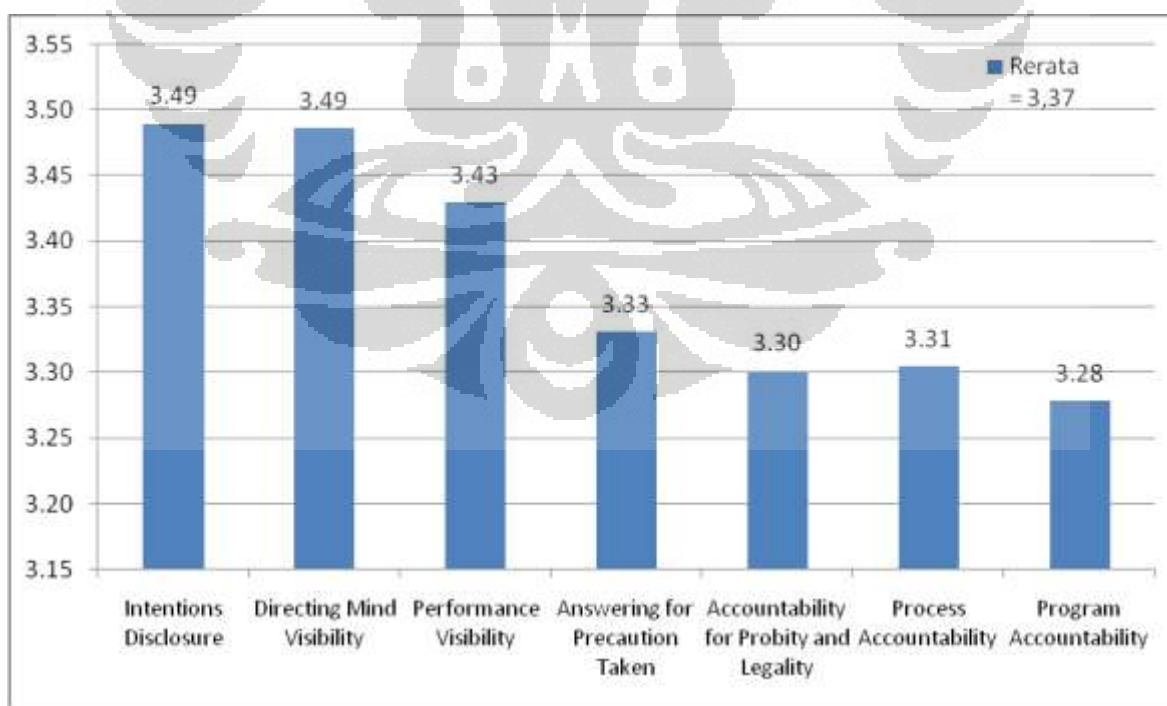
Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas pelaksanaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA di kabupaten Gresik Jawa Timur, dengan sampel penelitian sebanyak 9 sekolah SMP negeri maupun swasta yaitu: SMPN 1 Driyorejo, SMPN 1 Balongpanggang, SMPN 1 Menganti, SMP Sunan Giri, SMPN 2 Gresik, SMPN 4 Gresik, SMP Sunan Ampel, SMP PGRI Kedamean dan SMP YPM 5, datanya diperoleh

dari skor rerata ke-6 dimensi indikator, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.8
Nilai Rerata Dimensi Indikator Akutabilitas Pelaksanaan Program Bantuan
Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP

No	Dimensi Indikator	Rerata
1	Intentions Disclosure	3.49
2	Directing Mind Visibility	3.49
3	Performance Visibility	3.43
4	Answering for Precaution Taken	3.33
5	Accountability for Probity and Legality	3.30
6	Process Accountability	3.31
7	Program Accountability	3.28
	Rerata	3.37

Jika data rerata dari ketujuh dimensi indikator yang terkait dengan akuntabilitas pelaksanaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA dibuat dalam bentuk diagram, maka akan tampak seperti pada Gambar 4.8. berikut:



Gambar 4.8 Rerata Dimensi Indikator Akutabilitas

Berdasarkan data pada Tabel 4.8. menunjukkan bahwa nilai rerata ketujuh dimensi indikator yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP di kabupaten Gresik adalah 3,37 atau 67,4% yang berarti akuntabilitasnya tergolong *tinggi*. Akuntabilitas dengan kategori tinggi dapat dimaknai bahwa sekolah telah melaksanakan program pembangunan ruang laboratorium IPA secara akuntabel, dan berdasarkan gambar 4.8 menunjukkan bahwa sebaran kualitasnya cukup beragam ini menunjukkan adanya dinamika yang cukup kuat untuk mencapai nilai akuntabilitas yang tinggi pada saat sekolah melaksanakan program pembangunan ruang laboratorium IPA.

Tetapi ada yang menarik yang perlu dicermati dari ketujuh komponen akuntabilitas, dimensi yang ke-tujuh merupakan dimensi akuntabilitas yang perolehan rerata nya paling rendah, dimensi tersebut terdiri dari dua indikator, yaitu indikator-1 menyatakan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak? indikator tersebut dielaborasi menjadi beberapa pertanyaan, yaitu: (1) apakah P2S menetapkan target yang dicapai, (2) apakah P2S menetapkan tujuan, dan (3) apakah P2S menambahkan kepanitiaan kalau dirasakan kurang. Indikator

Indikator 2 apakah P2S mempertimbangkan alternatif program yang memberi hasil yang optimal dengan biaya yang minimal? Indikator tersebut dielaborasi menjadi (1) apakah P2S mengganti kepanitiaan, (2) apakah P2S menambah pekerja baru, dan (3) apakah P2S mengurangi para pekerja jika pekerjaannya kurang optimal. Perolehan rerata dari dimensi ini terendah dibandingkan dengan dimensi yang lain walaupun secara umum interpretasinya masing tergolong tinggi, hal ini menunjukkan bahwa panitia pembangunan ruang laboratorium IPA SMP perlu melakukan evaluasi terhadap target pencapaian pembangunan ruang laboratorium IPA SMP dan segera mengambil tindakan jika dirasakan bahwa proses pembangunan ruang laboratorium IPA tersebut dirasakan kurang optimal.

4.3. Analisis Hasil Wawancara

Melengkapi data kuantitatif yang telah dibahas diatas, dilakukan wawancara kepada responden penelitian yang berasal dari 5 sekolah sampel penelitian antara lain: bendahara sekolah, Kepala Sekolah, guru, Komite Sekolah, dan orang tua siswa, adapun ke-6 sekolah yang dimaksud adalah SMPN 1 Driyorejo, SMPN 1 Balongpanggung, SMPN 1 Menganti, SMP Sunan Giri, SMPN 2 Gresik, SMP Sunan Ampel, dan SMP PGRI Kedamean. Hasil-hasil wawancara dengan beberapa responden dapat dikemukakan sebagai berikut.

Hasil wawancara dengan **responden Bendahara Sekolah** untuk Item pertanyaan (2): Apakah bapak/ibu/saudara memahami isi dari proses pertanggungjawaban keuangan pembangunan ruang laboratorium IPA? Diperoleh informasi dari salah satu sekolah yaitu :” sudah membaca tetapi sebagian ada yang kurang faham” dan jika dikumpulkan hasil wawancara dengan beberapa bendahara sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar bendahara sekolah sudah memahami proses pertanggungjawaban keuangan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP, tetapi belum seluruhnya karena belum ada sosialisasi atau pelatihan.
- 2) Sebagian besar bendahara sekolah sudah membaca buku petunjuk proses pertanggungjawaban keuangan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP tetapi masih cukup banyak yang merasa kurang faham.
- 3) hampir semua bendahara sekolah menyatakan bahwa mereka melakukan pencatatan terhadap semua pemasukan dan pengeluaran

Kepada responden bendahara sekolah juga ditanyakan item pertanyaan (6) dan (7): Dalam menyusun pembukuan Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Bank dan pendokumentasian data pendukung (kwitansi), Apakah mengalami kesulitan? Jika ada kesulitan apa sarannya. Hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) bendahara sekolah melakukan pendokumentasian keuangan terutama pendokumentasian kwitansi yang lebih dari Rp. 1 juta dan pihak rekanan tidak punya NPWP maka pajaknya menggunakan NPWP sekolah. Saran bendahara sekolah adalah: Mohon untuk bendahara sekolah diberikan latihan pembukuan.
- 2) Sebagian besar bendahara sekolah merasa kesulitan dalam menyusun pembukuan Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Bank dan pendokumentasian data pendukung (kwitansi). Untuk itu saran yang dikemukakan responden adalah sebagai berikut: sebaiknya ada arahan atau pelatihan.
- 3) beberapa bendahara sekolah merasa bahwa melakukan pembukuan Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Bank dan pendokumentasian data pendukung (kwitansi) tidak sulit tetapi perlu pelatihan dan bimbingan takut pengisiannya salah.

Kepada responden bendahara sekolah juga ditanyakan item pertanyaan (12): Mohon memberikan usulan/saran agar meningkatkan akuntabilitas pembangunan ruang laboratorium IPA di sekolah atau bantuan lainnya. Hasil yang didapat dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mohon ada pelatihan pembukuan Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Bank dan pendokumentasian data pendukung (kwitansi) bagi bendahara sekolah.
- 2) Bendaharawan sekolah sebelum pelaksanaan diajari teknik pembukuannya secara benar,
- 3) Hendaknya diadakan workshop tentang cara pembuatan laporan dan pembukuan yang baik dan benar bagi bendahara sekolah.

Wawancara juga dilakukan dengan **responden Kepala Sekolah**. Kepada Kepala Sekolah ditanyakan Item pertanyaan (9): Apakah bapak/ibu/saudara dapat melihat pembukuan program pembangunan ruang laboratorium IPA yang

dipegang oleh bendahara? Informasi yang didapat dari hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Sekolah dapat melihat pembukuan program pembangunan ruang laboratorium IPA karena dengan bendahara sekolah saling memberikan masukan.
- 2) Kepala Sekolah dapat pada saat melakukan pengecekan ke bendahara.
- 3) Kepala Sekolah dapat mengetahui apakah dana pembangunan ruang laboratorium IPA SMP sudah dibelanjakan barang atau belum.

Wawancara juga dilakukan dengan **responden Guru**, kepada guru ditanyakan hal yang berkaitan dengan akuntabilitas, yaitu item pertanyaan (9): Apakah bapak/ibu/saudara dapat melihat pembukuan program pembangunan ruang laboratorium IPA yang dipegang oleh bendahara? Informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) guru dapat melihat pembukuan karena diminta bendahara untuk membantu pembukuan, terutama guru yang dilibatkan dalam proses pembukuan.
- 2) beberapa guru responden juga menyatakan bahwa, dia tidak dapat melihat pembukuan program pembangunan ruang laboratorium IPA karena bukan wewenangnya.
- 3) beberapa guru dari sekolah yang berbeda menyatakan bahwa mereka dapat melihat pembukuan program pembangunan ruang laboratorium IPA karena pembukuan tersebut bersifat terbuka

Wawancara dengan **responden Komite sekolah** terkait dengan item pertanyaan (9): Apakah bapak/ibu/saudara dapat melihat pembukuan program pembangunan ruang laboratorium IPA yang dipegang oleh bendahara? Hasil yang diperoleh dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Komite Sekolah dapat melihat karena merupakan salah satu bentuk pengawasan pihak komite sekolah.
- 2) Komite Sekolah dapat melihat pembukuan program pembangunan ruang laboratorium IPA karena sebagai komite tergabung dalam P2S.

- 3) Komite Sekolah dapat melihat pembukuan program pembangunan ruang laboratorium IPA karena pembukuan pembangunan laboratorium IPA SMP bersifat terbuka.

Wawancara terakhir dilakukan dengan **responden Orang tua siswa**. Kepada Orang Tua siswa juga ditanyakan hal yang berkaitan dengan akuntabilitas, untuk itu ditanyakan item pertanyaan (9): Apakah bapak/ibu/saudara dapat melihat pembukuan program pembangunan ruang laboratorium IPA yang dipegang oleh bendahara? Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) beberapa orang tua yang terlibat dengan program pembangunan ruang laboratorium IPA SMP dapat melihat karena diminta bendahara untuk membantu pembukuan.
- 2) ada orang tua siswa yang menyatakan bahwa orang tua siswa dapat melihat pembukuan program pembangunan ruang laboratorium IPA karena bersifat terbuka.
- 3) sebagian orang tua siswa menyatakan bahwa orang tua siswa tidak dapat melihat pembukuan program pembangunan ruang laboratorium IPA karena belum pernah menanyakan.
- 4) ada juga beberapa orang tua siswa yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat melihat pembukuan program pembangunan ruang laboratorium IPA karena bukan hak nya tetapi informasi pembukuan program pembangunan ruang laboratorium IPA sudah disampaikan oleh Kepala sekolah.

Berdasarkan berbagai wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden yang berkaitan dengan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP dapat dinyatakan bahwa Kepala Sekolah selaku penanggung jawab program pembangunan ruang laboratorium IPA merasa bahwa pihak bendahara sudah membuat pembukuan untuk keperluan pelaporan kegiatan dan pengecekan keluar masuknya keuangan dan barang, masalah baik-tidaknya bentuk pembukuan tidak terpantau dengan baik, walaupun Kepala sekolah memberikan masukan dengan pengetahuan pembukuan yang seadanya dan terbatas pada masalah peruntukan keuangan saja.

Guru, komite sekolah, dan orang tua siswa menunjukkan komitmen yang baik bagi program pembangunan ruang laboratorium IPA, dan khusus untuk masalah pembukuan (administrasi keuangan) mereka berada di kapasitasnya masing-masing, tidak saling interfensi bahkan menunjukkan kerja sama yang baik sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Hasil wawancara juga diperoleh gambaran bahwa bendahara P2S sejak sebelum dimulainya program pembangunan ruang laboratorium IPA, mereka tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal menyusun pembukuan Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Bank dan pendokumentasian data pendukung (kwitansi), Sehingga walaupun mereka bekerja sebaik mungkin tetap saja hasilnya tidak sempurna karena tata cara penyusunan sistim pembukuan keuangannya tidak standard dan sangat ditentukan oleh format-format kebiasaan yang ada di sekolahnya masing-masing. Kekhawatiran seperti ini tampak dari keinginan semua bendahara P2S untuk memperoleh pelatihan (workshop) tentang pengelolaan administrasi keuangan sebelum program pembangunan berlangsung bahkan setelah berlangsungpun mereka masih berharap ada bimbingan teknik dalam pembukuan keuangan.

4.4. Akuntabilitas Pembangunan Ruang Lab. IPA SMP

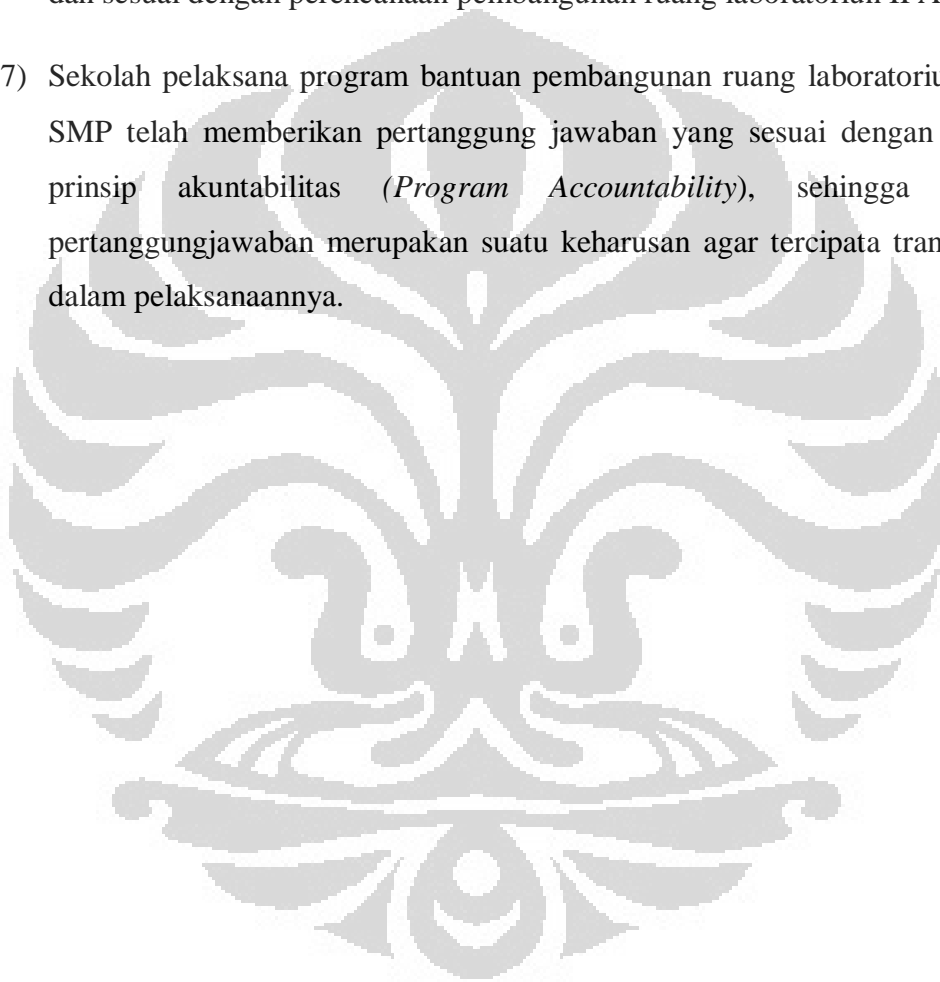
Hasil analisis dan pembahasan akuntabilitas pembangunan ruang laboratorium IPA SMP yang telah dikemukakan diatas adalah untuk mengetahui bagaimana karakteristik faktor-faktornya yaitu melalui hasil analisis data dari tujuh dimensi indikator akuntabilitas, yang meliputi: Pengungkapan Tujuan (*Intentions Disclosure*), Kemampuan Mengarahkan Pikiran yang Jelas (*Directing Mind Visibility*), Unjuk Kerja Nyata (*Performance Visibility*), Menjawab Tindakan Pencegahan (*Answering for Precaution Taken*), Pertanggungjawaban untuk Kejujuran dan Kesahannya (*Accountability for Probitiy and Legality*), Proses Pertanggungjawaban (*Process Accountability*), dan Program Pertanggungjawaban (*Program Accountability*).

Secara umum tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dengan kategori tinggi, hal ini dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Sekolah pelaksana program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, telah memiliki niat atau keinginan (*Intentions*) yang kuat untuk memberikan pengungkapan (*Disclosure*) laporan yang jelas kepada stakeholder, Tetapi dalam hal pengungkapan pelaporannya masih kurang jelas terutama pada bagian pelaporan sistim administrasi keuangan, hal ini didukung juga dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa sebagian besar bendahara sekolah merasa kesulitan dalam menyusun pembukuan Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Bank dan pendokumentasian data pendukung (kwitansi).
- 2) Sekolah pelaksana program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP iatelah mengarahkan semua kemampuan pikirannya ke arah yang jelas (*Directing Mind Visibility*) sesuai dengan rencana pembangunan ruang laboratorium yang telah ditentukan sebelumnya.
- 3) Sekolah pelaksana program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP telah melakukan unjuk kerja nyata (*Performance Visibility*) yaitu telah memberikan laporan berdasarkan pada penggunaan anggran yang jelas.
- 4) Sekolah pelaksana program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP telah memberikan jawaban berbentuk laporan atas permintaan pemberi bantuan *blockgrand* yaitu Direktorat PSMP, dengan memberikan jawaban secara nyata/ riil atas apa yang telah dilakukan sesuai dengan program yang telah ditentukan, tetapi dalam hal memberikan informasi tentang program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA ke masyarakat setempat masih kurang jelas, ini berakibat pada kurang optimalnya dukungan masyarakat pada program tersebut.
- 5) Sekolah pelaksana program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP telah memberikan pertanggung jawaban secara jujur dan sah

(Accountability for Probity and Legality) menurut tata aturan yang berlaku.

- 6) Sekolah pelaksana program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP telah memberikan pertanggung jawaban sesuai dengan proses akuntabilitas (*Process Accountability*) yang berarti bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dan sesuai dengan perencanaan pembangunan ruang laboratoriu IPA.
- 7) Sekolah pelaksana program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP telah memberikan pertanggung jawaban yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas (*Program Accountability*), sehingga laporan pertanggungjawaban merupakan suatu keharusan agar tercipta transparansi dalam pelaksanaannya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dikembangkan untuk mengetahui bagaimana tingkat akuntabilitas dan bagaimana karakteristik faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelaksanaan pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP, terutama di SMP baik negeri maupun swasta yang memperoleh bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik faktor-faktornya yaitu melalui hasil analisis data dari tujuh dimensi indikator akuntabilitas, yang meliputi: Pengungkapan Tujuan (*Intentions Disclosure*), Kemampuan Mengarahkan Pikiran yang Jelas (*Directing Mind Visibility*), Unjuk Kerja Nyata (*Performance Visibility*), Menjawab Tindakan Pencegahan (*Answering for Precaution Taken*), Pertanggungjawaban untuk Kejujuran dan Kesahannya (*Accountability for Probity and Legality*), Proses Pertanggungjawaban (*Process Accountability*), dan Program Pertanggungjawaban (*Program Accountability*).

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dengan kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di Kabupaten Gresik Jawa Timur sudah memiliki keinginan (*Intentions*) yang kuat untuk memberikan pengungkapan (*Disclosure*) laporan yang jelas; telah mengarahkan semua kemampuan pikirannya ke arah yang jelas (*Directing Mind Visibility*) sesuai dengan rencana pembangunan ruang laboratorium yang telah ditentukan sebelumnya; telah melakukan unjuk kerja nyata (*Performance Visibility*) yaitu memberikan laporan berdasarkan pada penggunaan anggaran yang jelas; telah memberikan jawaban berbentuk laporan atas permintaan pemberi bantuan *blockgrand*; telah memberikan pertanggung jawaban secara jujur dan sah (*Accountability for Probity and Legality*) menurut tata aturan yang berlaku; telah memberikan

pertanggung jawaban sesuai dengan proses akuntabilitas (*Process Accountability*) dan telah memberikan pertanggung jawaban yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas (*Program Accountability*).

Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam hal akuntabilitas, terutama mengenai kecukupan kepemilikan pengetahuan menyusun pembukuan Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Bank dan pendokumentasian data pendukung (kwitansi), sehingga walaupun bekerja sebaik mungkin tetap saja hasilnya tidak sempurna karena tata cara penyusunan sistim pembukuan keuangannya tidak standard dan sangat ditentukan oleh format-format kebiasaan yang ada di sekolahnya masing-masing.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil temuan akuntabilitas dan karakteristiknya pada pengelolaan program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP, peneliti dapat memberikan saran, bahwa Pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP ini melibatkan peran kepala sekolah, guru-guru, staf tata usaha dan komite sekolah maupun masyarakat yang terangkum dalam Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), untuk itu penelitian tentang akuntabilitas perlu digali secara mendalam dari berbagai unsur yang terlibat dalam kepanitiaan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP.

Penelitian yang dilakukan hanya pada satu wilayah saja, sedangkan pemberian bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP mencakup seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu penelitian ini perlu diperluas cakupan wilayah sarannya dengan mempertimbangkan pembagian wilayah geografis, ekonomi, dan budaya.

Salah satu hasil penelitian adalah adanya hambatan dalam pembangunan ruang laboratorium IPA SMP baik dari faktor internal maupun eksternal, berdasarkan hasil penelitian tersebut perlu dilakukan upaya meningkatkan kerjasama dengan masyarakat di sekitar sekolah melalui pemberitahuan dengan surat atau rapat-rapat ke orang tua siswa bahwa ada bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA di sekolah, agar dapat memberikan kontribusi baik dalam

bentuk dana, tenaga, kebersihan maupun keamanan, sehingga masyarakat merasa memiliki bangunan disekitar sekolah.

Hasil penelitian dapat digunakan oleh pengambil kebijakan untuk memperbaiki proses persiapan dan pelaksanaan pembangunan ruang laboratorium IPA SMP, antara lain: (a) Mengikutsertakan komite sekolah dalam pengawasan baik pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan maupun kegiatan pembangunan ruang laboratorium IPA di sekolah, sehingga asas transparansi dapat berjalan. (b) Meningkatkan proses pengawasan dan bimbingan melalui monitoring dan evaluasi oleh pihak pemberi bantuan pembangunan baik dari pusat maupun melalui Dinas Pendidikan setempat pada saat pelaksanaan pembangunan agar pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai kesepakatan antara pemberi bantuan dan penerima bantuan, serta setelah pembangunan ruang laboratorium IPA selesai agar kualitas dan kegunaannya sesuai peruntukannya.

Hasil penelitian lain adalah lemahnya para pelaksana program bantuan pembangunan ruang laboratorium dalam bidang administrasi keuangan, oleh karena itu disarankan sebelum program pembangunan dilaksanakan sebaiknya ada kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan administrasi keuangan, baik dalam bentuk pelatihan ataupun bimbingan teknis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ach. Wazir Ws., *et al.*, ed. (1999). *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, (1997, 2003). *Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Asian Development Bank, *Governance Sound Development Management*, 1999.
- B. Guy Peters, (2000), "*The Politics of Bureaucracy*", London: Routledge
- Boediono, 1996, *Kebijakan Wajib Belajar Sebagai Proses Pembangunan Masyarakat Ekonomi, Pusat Penelitian Sains dan Teknologi*, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, Depok
- Boy Denny dan Siringoringo Hotniar (2009), *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) terhadap Partisipasi Orang Tua Murid*, Depok, Pasca Sarjana Universitas Gunadarma.
- Bryce, (1990). *Techniques for assessing process skills in practical science: Teacher's guide*. Oxford: Heinemann Educational Books.
- Budiardjo, Miriam (1998). *Menggapai Kedaulatan Rakyat Bandung*: Mizan
- Bungin, Burhan (2008). *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Ilmu Sosial Lainnya*. Jakart: Kencana Prenada Media Group
- Cochran, Charles L dan Eloise F. Malone. (1999). *Public Policy Perspectives and Choises*. New York: Megraw – Hill Inc.
- Conyers, Diana. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dadang Solihin. (2006). *Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel*. Diklatpim Tingkat IV Angkatan III, Pusdiklat Pegawai BPK, Jakarta
- Dunn, William N (1981). *Public Policy Analysis: An introduction, New Jersey: Pearson Education*. Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) dengan judul Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Hanindita Graha Widya; Yogyakarta

- Dwiyanto, Agus (1995). *Kebijaksanaan Publik Proses Analisis*; UGM, Yogyakarta
- Dye, R Thomas. (2002). *Understanding Public Policy An Introduction*. Tenth Edition: Prentice hall Publishing
- Era Mutu SMP. (2010). Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional
- Gharty, J.B (1987). *Crisis, Accountability and Development in the Third World*, London.
- Isbandi Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- John Gaventa dan Camilo Valderama: *Partisipasi kewargaan, dan Pemerintah Daerah, sebagai pengantar buku Mewujudkan partisipasi; Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21*, diterbitkan oleh The British Council dan New Economics Foundation, 2001
- Karno To. (1996). *Mengenal Analisis Tes (Pengenalan ke Program Komputer ANATES)*. Bandung: Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan FIP IKIP.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1997). *Administrasi Pembangunan Perkembangan & Praktikan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Kerlinger, (1996), *Azas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press
- Lembaga Administrasi Negara-BPKP. (1999). *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). *Akuntabilitas Dan Good Governance*. Jakarta: LAN dan BPKB
- Lembaga Administrasi Negara RI dan BPKP (2001).
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* . Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- _____. (2004). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Muhadjir, Noeng. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Nasution, S. (1992). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito: Bandung.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Nazir, Moh. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho Riant. (2008). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo Publishing
- Panduan Pelaksanaan dan Teknis Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (2010), Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas & Depdagri, (2002).
- Raharjo, Budi. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Rahman, Meuthia Ganie. (2000). *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*. Jakarta: Penerbit Komnas HAM
- Randall, B. Ripley. (1985). *Policy Analysis in Political Science*. Chichago: Nelson.
- Rasul, Sjahruddin. (2003). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia
- Rezba. (1995). *Learning and assessing science process skills*. (3rd ed.) Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company.
- Ridwan, (2004). *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta
- Shafritz, Jay M dan Russel, E.W. (1997). *Introducing Public Administration, USA: Addison – Wesley Educational Publisher Inc.*
- Silalahi, Ulbert. (1996). *Asas-Asas Manajemen, Pemahaman Praktis*. Bandung: Mandar Maju
- SMP Dalam Angka. (2010). Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional.

- Subroto, Agus (2009), *Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008*, Semarang, Program Pasca Sarjana UNDIP.
- Sugiyono. (2002). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta
- _____. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sumampouw, Monique. (2004). “*Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif*.” Jacob Rais, et al. *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Supriyono. (2001). *Akuntansi Manajemen 3: Proses Pengendalian Manajemen Edisi 1*, Yogyakarta; STIE YKPN
- Surachman, Winarno. (1978). *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: CV. Tarsito
- Syambasri, Munaf. (2001). *Evaluasi Pendidikan Fisika*. Jurusan Pendidikan Fisika FPMIPA UPI.
- Tapilow, F. (1997). *Kreativitas Berpikir Anak Usia SD Dalam Memecahkan Masalah-Masalah IPA*. Disertasi pada PPS UPI Bandung: Tidak diterbitkan.
- Tilaar, H.A.R., & Nugroho, Riant. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (2001). *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: MIA – UNKRIS.
- Wasistiono, Sadu. (2002). *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokus Media
- _____. 2005. *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*. Jakarta: LIPI Press
- Weisman, Gerald D, (1981), *Modelling Environment and Behavior System*, USA, Pennsylvania
- Wibawa, Samodra, dkk. (1994) *Evaluasi Kebijakan Publik*. Rajawali Press : Yogyakarta.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*. Surabaya: Insan Cendekia

Wilson, John dan Hinton, Peter (1993) *Public Services & The 1990'S, Issues in Public Service Finance and Management, Great Britain : Tudor Business Publishing Ltd.*

Artikel:

Sajogo, Keswadayaan dan Saling Memberdayakan, Artikel – Th. I – No. 5 – Juli 2002

Soetaryono, Retno. (1999). *Modul IV Integrated Envaironmental Management*. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Krina P, LL (2003) “*The management of public change: from ‘old public administration’ to ‘new public management’* dalam “*Law & Governance*” Issue I, British Council Briefing.

Dokumen Elektronik:

M. Irfan Islamy, Op Cit, hal 18 dilihat dari materi kuliah Drs. Ulul Albab, MS. Dilihat di http://www.unitomo.ac.id/artikel/ululalbab/public_polecy4.pdf.

Seputar internal audit Indonesia 2010 - <http://internalauditindonesia.wordpress.com/2010/02/11/7-aspek-penting-membangun-akuntabilitas/>

Peraturan Perundang-undangan:

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2010

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

,

LAMPIRAN I**Instrumen Kuesioner****Daftar Isian Akuntabilitas Bantuan Pembangunan Ruang Lab. IPA SMP****A. Identitas**

- a. Nama :
 b. Jabatan :
 c. Nama sekolah :
 d. Alamat sekolah :

B. Daftar Isian**Petunjuk:**

1. Bubuhkan identitas sekolah seperti pada isian di bawah ini.
2. Baca pernyataan dengan cermat dan pilihlah alternatif jawaban yang sesuai dengan kenyataan.
3. Alternatif jawaban yang diberikan, jika saudara memilih angka 1, berarti jawaban saudara adalah “sangat sesuai dengan kenyataan”, berikut jawaban yang diberikan:

1 = Sangat sesuai dengan kenyataan

2 = Sesuai dengan kenyataan

3 = Tidak tahu

4 = Kurang sesuai dengan kenyataan

5 = Sangat tidak sesuai dengan kenyataan

4. Pilihan yang tepat sesuai dengan kenyataan yang ada saudara alami.

No.	Pernyataan	Pilihan				
		1	2	3	4	5
1	Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP kepada atasan					
2	Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP kepada orang tua siswa					
3	Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP kepada penititan					

	pembangunan sekolah (P2S)					
4	Laporan pertanggung jawaban yang disampaikan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan					
5	Laporan pertanggung jawaban yang disampaikan tidak menimbulkan dua persepsi					
6	Laporan pertanggung jawaban yang disampaikan sesuai dengan kaidah pelaporan					
7	Laporan pertanggung jawaban yang telah dibuat dipublikasikan melalui komite sekolah					
8	Laporan pertanggung jawaban yang telah dibuat dipublikasikan melalui papan pengumuman					
9	Laporan pertanggung jawaban yang telah dibuat dipublikasikan untuk kalangan sendiri					
10	Memberikan laporan pertanggung jawaban kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP yang telah dilaksanakan kepada pihak Dit. PSMP					
11	Memberikan laporan kemajuan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP yang telah dicapai kepada pihak Dit. PSMP					
12	Memberikan laporan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP yang belum terlaksana kepada pihak Dit. PSMP					
13	Kepala sekolah memberikan laporan progres bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP setiap satu bulan sekali					
14	Kepala sekolah memberikan laporan tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam					

	bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP					
15	Ketua panitia memberikan laporan tentang kendala yang dialami berkaitan dengan masalah keuangan					
16	Kepala sekolah sebagai penanggungjawab kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP memberikan laporan akuntabilitas kepada Dit. PSMP					
17	Guru sebagai ketua kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP memberikan laporan akuntabilitas kepada panitia pembangunan sekolah (P2S)					
18	Guru sebagai bendahara kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP memberikan laporan akuntabilitas kepada panitia pembangunan sekolah (P2S)					
19	Kepala sekolah memberikan informasi kepada masyarakat setempat mengenai bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP					
20	Kepala sekolah memberikan informasi kepada masyarakat setempat mengenai dampak dari bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP yaitu kebisingan					
21	Kepala sekolah memberikan informasi kepada masyarakat setempat dampak terhadap lingkungan mengenai bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP					
22	Kepala sekolah memberikan informasi kepada masyarakat setempat untuk menghindari tempat					

	bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP					
23	Ketua panitia telah memberikan pengamanan dalam bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP					
24	Ketua panitia telah memberikan pengamanan kepada masyarakat dalam bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP					
25	Kepala sekolah sebagai penanggungjawab kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP memberikan laporan sesuai dengan fakta yang ada					
26	Guru sebagai ketua kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP memberikan laporan keuangan sesuai dengan laporan dari bendahara					
27	Guru sebagai bendahara kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP memberikan laporan keuangan sesuai dengan laporan buku kas umum (BKU)					
28	Panitia pembangunan sekolah (P2S) melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, telah sesuai dengan Juklak yang dikeluarkan Dir. PSMP					
29	Panitia pembangunan sekolah (P2S) melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, telah memberikan laporan akuntabilitas sesuai dengan peraturan pemerintah					
30	Panitia pembangunan sekolah (P2S)					

	melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, telah memberikan laporan akuntabilitas sesuai dengan kesepakatan panitia pembangunan sekolah					
31	Panitia pembangunan sekolah (P2S) sebelum melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, telah memiliki kemampuan dalam sistem informasi akuntansi					
32	Panitia pembangunan sekolah (P2S) sebelum melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, telah memiliki kemampuan dalam sistem informasi manajemen					
33	Panitia pembangunan sekolah (P2S) sebelum melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, telah memiliki kemampuan dalam prosedur administrasi					
34	Panitia pembangunan sekolah (P2S) dalam melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, memberikan layanan yang cepat kepada semua pihak terkait					
35	Panitia pembangunan sekolah (P2S) dalam melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, mendengarkan semua keluhan dari pihak terkait					
36	Panitia pembangunan sekolah (P2S) dalam melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, memberikan layanan dengan cuma-cuma kepada pihak yang					

	membutuhkan informasi					
37	Panitia pembangunan sekolah (P2S) dalam melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, telah menetapkan target yang harus dicapai					
38	Panitia pembangunan sekolah (P2S) dalam melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, telah menetapkan tujuan agar pembangunan laboratorium segera selesai					
39	Guru sebagai ketua panitia dalam melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, telah menambah kepanitiaan baru agar tujuan tercapai sesuai target					
40	Kepala sekolah sebagai penanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, akan mengganti kepanitian, jika kegiatan ini tidak tercapai sesuai tujuan					
41	Guru sebagai ketua panitia dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bantuan laboratorium IPA, telah menambah para pekerja baru dalam mempecepat bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP					
42	Guru sebagai ketua panitia dalam melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, telah mengurangi para pekerja agar dapat menghemat pembiayaan					

43	Panitia pembangunan sekolah (P2S) melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, telah memberikan laporan akuntabilitas sesuai dengan kebiasaan yang ada					
44	Panitia pembangunan sekolah (P2S) sebelum melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, tidak menggunakan manajemen baku					
45	Panitia pembangunan sekolah (P2S) dalam melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA-SMP, memberikan layanan informasi hanya kepada orang tertentu saja					

LAMPIRAN II

Instrumen Observasi

Nama (*boleh tidak ditulis*) :
 Jabatan : Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, Orang tua (coret yang tidak sesuai)
 Sekolah :

1. Pedoman Observasi

Pedoman observasi/pengamatan digunakan agar apa yang akan dilakukan ketika melakukan pengamatan, tidak akan keluar dari aspek-aspek konsep penelitian, langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

1. Menyiapkan seperangkat alat tulis yaitu; kertas, pensil/pulpen
2. Membuat rancangan atau desain, tentang langkah apa yang harus dilakukan
3. Mencatat setiap kegiatan/kejadian yang ada di sekolah yaitu di Kabupaten Gresik
4. Melakukan verifikasi data-data yang berkaitan dengan subpokok pembahasan
5. Masukan hasil observasi lapangan ke dalam matriks, untuk mempermudah penganalisan data

2. Hasil Observasi

Hasil observasi atau pengamatan langsung, yang dilakukan penulis ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Sebelum melakukan observasi yang berkaitan dengan dimensi dan indikator, terlebih dahulu dibentuk panitia pembangunan sekolah (P2S) sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan yaitu terdiri atas;
 - a. **Penanggung Jawab**, adalah kepala sekolah penerima block grant yang bersangkutan.
 - b. **Ketua**, adalah guru tetap pada sekolah penerima block grant yang bersangkutan.

- c. **Sekretaris**, sebagai pengelola administrasi teknis pembangunan sekolah merangkap anggota P2S, adalah wakil wali murid yang bukan guru di sekolah tersebut dan bukan pemborong/rekanan
- d. **Bendahara** merangkap anggota P2S, adalah bendahara rutin atau guru tetap pada sekolah penerima block grant yang bersangkutan, berfungsi sebagai pemegang kas dan juru bayar P2S
- e. **Administrasi Keuangan**, sebagai pengelola administrasi keuangan merangkap anggota P2S yang bertugas mencatat semua pengeluaran/penggunaan dana P2S dalam Buku Kas Umum, adalah wakil wali murid yang bukan guru di sekolah tersebut dan bukan pemborong/rekanan
- f. **Penanggungjawab Teknis** merangkap anggota P2S yang bertanggungjawab dalam implementasi teknis pembangunan adalah wakil wali murid pada sekolah penerima block grant yang bersangkutan atau tokoh masyarakat setempat
- 2) Masing-masing panitia pembangunan sekolah (P2S) memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak terkait khususnya lembaga pemberi dana yaitu Dirjen Pembinaan SMP
 - 3) Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), wajib melaporkan kegiatan apa yang telah dilakukan oleh anggota organisasi dan Laporan tersebut harus dipublikasikan kepada masyarakat
 - 4) Memberikan laporan pertanggungjawaban secara berkala
 - 5) Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, laporan administrasi, laporan kemajuan dan hambatan yang ditemui di lapangan

Instrumen wawancara dan observasi

Nama (*boleh tidak ditulis*) :
 Jabatan : Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, Orang tua
 (coret yang tidak sesuai)
 Sekolah :

1. Apakah program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA ini direncanakan dengan melibatkan unsur sekolah dan komite sekolah serta orang tua ?
 Bila Ya, Jelaskan.....

 Bila Tidak, Jelaskan.....

2. Apakah ada rapat sosialisasi program bantuan pembangunan ruang laboratorium IPA di sekolah ? dan siapa saja yang diundang ?

3. Dalam rapat pembentukan panitia pembangunan sekolah dalam rangka pembangunan ruang laboratorium IPA, apakah ada undangan rapat ? dan siapa saja?
 a. Ya, yang diundang.....

 b. Tidak, jelaskan.....

4. Apakah ada kontribusi unsur orang tua atau komite sekolah terhadap program tersebut, dalam bentuk dana, tenaga, dan pemikiran dalam rapat ?
 a. Ya jelaskan

 b. Tidak jelaskan

5. Apakah ada kontribusi dari Dinas Pendidikan Kabupaten dalam membantu program pembangunan ruang laboratorium IPA, dalam bentuk supervisi, dana, dan sebagainya ?

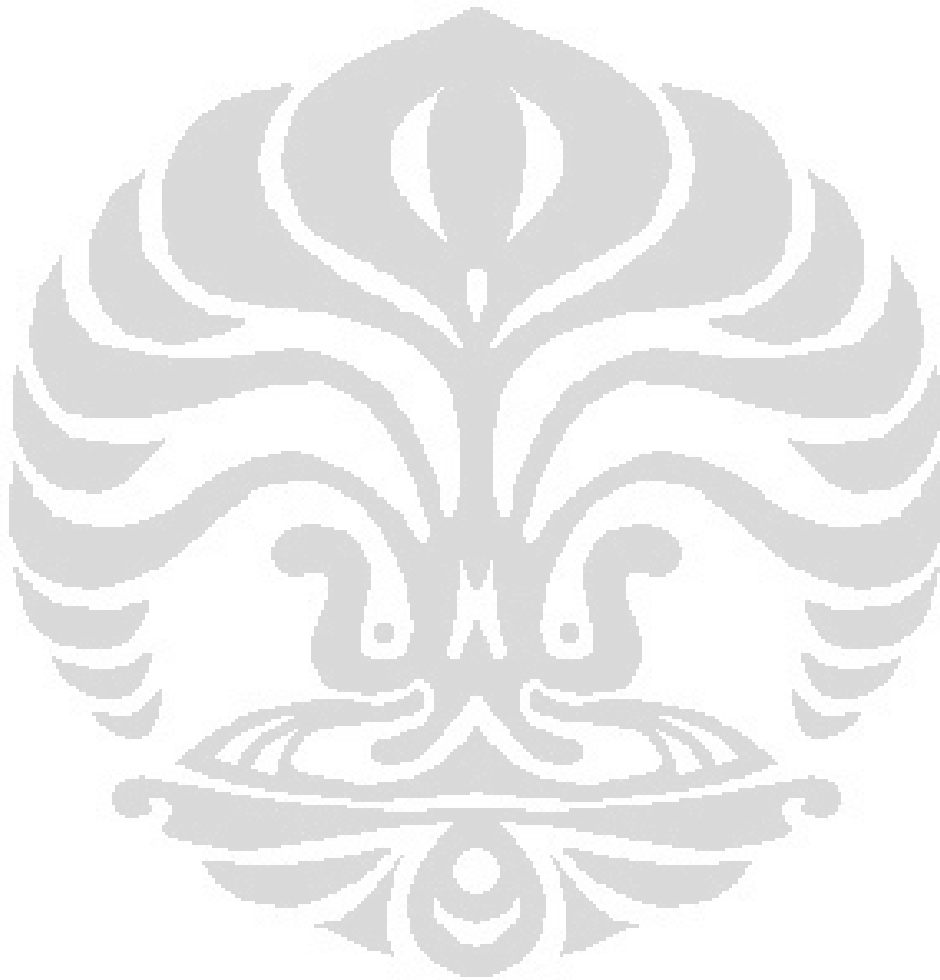
6. Apakah ada unsur masyarakat yang terlibat keanggotaan panitia pembangunan sekolah ?

- a. Ya Jabatan.....
 b. Tidak, Jelaskan
7. Apakah sekolah membuat rencana anggaran biaya (RAB) untuk pembangunan ruang laboratorium IPA sesuai dengan buku panduan pelaksanaan dan teknis ?
 a. Ya, dapat menunjukkan dokumen.
 b. Tidak, karena.....
8. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui program pembangunan ruang laboratorium IPA yang ada disekolah dengan dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMP, Kemdiknas ? jelaskan
9. Apakah Bapak/Ibu/Saudara dapat melihat pembukuan program pembangunan ruang laboratorium IPA yang dipegang oleh bendahara ?
 a. Ya karena.....
 b. Tidak karena
10. Apakah dalam menyusun rencana anggaran biaya (RAB) dilakukan rapat dan siapa saja yang diundang ?
11. Apakah Dinas Pendidikan Kabupaten mengawasi atau supervisi ke sekolah untuk membantu dalam proses pembangunan ruang laboratorium IPA ?
 a. Ya jelaskan.....
 b. Tidak Jelaskan
12. Menurut Bapak/Ibu/Saudara pola lebih baik pola swakelola/pelaksanaan pembangunan ruang laboratorium IPA dilakukan oleh sekolah bersama komite dapat dilanjutkan atau pola melalui proses kontraktor/tender ? jelaskan
13. Apakah sekolah telah membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program pembangunan ruang laboratorium IPA ke Dinas Pendidikan Kabupaten ?
 a. Ya, tanggalno. surat

.....
b. Tidak karena

14. Mohon memberikan usulan/saran agar meningkatkan akuntabilitas pembangunan ruang laboratorium IPA di sekolah atau bantuan lainnya ? (wajib diisi)

.....
.....
.....



Nama (*boleh tidak ditulis*) :
 Jabatan : Bendahara Panitia Pembangunan Sekolah (P2S)
 Sekolah :

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara Bendahara sudah menerima buku panduan pelaksanaan dari Direktorat Pembinaan SMP, Jakarta ?

2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara memahami isi dari proses pertanggungjawaban keuangan pembangunan ruang laboratorium IPA ? jelaskan

3. Apakah ada waktu khusus untuk membuat/mengisi pembukuan ?

4. Apakah Bapak/Ibu/Saudara membuat pembukuan yang terdiri buku kas umum, buku pembantu dan buku bank ?
 a. Ya dapat menunjukkan buku.....
 b. Tidak, karena.....
5. Apakah sudah menerima dana pembangunan program tersebut ? Kapan ? dan di laporkan ke Direktorat Pembinaan SMP, Jakarta ?

6. Dalam menyusun pembukuan Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku bank dan pendokumentasian data pendukung (kwitansi), Apakah mengalami kesulitan ?

7. Terkait dengan pertanyaan no. 4 bila mengalami kesulitan, apakah ada usulan/saran untuk mempermudah memahami pembukuan (contoh adanya pelatihan, dll.)?

8. Menurut Bapak/Ibu membuat laporan keuangan diperlukan/dibutuhkan pada program pembangunan ruang laboratorium IPA ?
 Ya, karena.....

- Tidak, karena

.....

 9. Dalam mengisi buku kas umum, buku pembantu dan buku bank dilakukan:
 a. setiap hari b. setiap minggu c. setiap bulan d. tidak
 dikerjakan

10. Apakah pembukuan keuangan program pembangunan ruang laboratorium
 IPA dapat diperlihatkan (terbuka) keseluruh unsur sekolah dan masyarakat
 ?

a. Ya, karena.....

b. Tidak, karena.....

11. Apakah Bapak/Ibu/ Saudara dalam menjadi bendahara pembangunan
 ruang laboratorium IPA merasa terbebani (terpaksa) atau mengganggu
 proses mengajar ? jelaskan

12. Mohon memberikan usulan/saran agar meningkatkan akuntabilitas
 pembangunan ruang laboratorium IPA di sekolah atau bantuan lainnya?
 (wajib diisi)

Lampiran: 2

HASIL UJI COBA VALIDITAS
INSTRUMEN AKUNTABILITAS DENGAN PROGRAM SPSS

Item Total Statistics

No.	r Hitung	r Tabel	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Hasil
NO_1	.698	0.444	.937	Valid
NO_2	.678	0.444	.912	Valid
NO_3	.728	0.444	.965	Valid
NO_4	.747	0.444	.937	Valid
NO_5	.652	0.444	.946	Valid
NO_6	.815	0.444	.989	Valid
NO_7	.597	0.444	.993	Valid
NO_8	.469	0.444	.973	Valid
NO_9	.782	0.444	.959	Valid
NO_10	.811	0.444	.927	Valid
NO_11	.812	0.444	.984	Valid
NO_12	.581	0.444	.993	Valid
NO_13	.598	0.444	.937	Valid
NO_14	.693	0.444	.928	Valid
NO_15	.573	0.444	.957	Valid
NO_16	.776	0.444	.952	Valid
NO_17	.497	0.444	.939	Valid
NO_18	.594	0.444	.948	Valid
NO_19	.794	0.444	.943	Valid
NO_20	.488	0.444	.933	Valid
NO_21	.578	0.444	.957	Valid
NO_22	.845	0.444	.974	Valid
NO_23	.737	0.444	.937	Valid
NO_24	.697	0.444	.925	Valid
NO_25	.567	0.444	.985	Valid
NO_26	.837	0.444	.993	Valid
NO_27	.593	0.444	.910	Valid
NO_28	.695	0.444	.975	Valid
No.	r Hitung	r Tabel	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Hasil

NO_29	.391	0.444	.910	Tidak Valid
NO_30	.598	0.444	.957	Valid
NO_31	.425	0.444	.989	Valid
NO_32	.879	0.444	.934	Valid
NO_33	.737	0.444	.917	Valid
NO_34	.627	0.444	.971	Valid
NO_35	.557	0.444	.925	Valid
NO_36	.327	0.444	.913	Tidak Valid
NO_37	.792	0.444	.970	Valid
NO_38	.658	0.444	.938	Valid
NO_39	.691	0.444	.924	Valid
NO_40	.834	0.444	.943	Valid
NO_41	.568	0.444	.939	Valid
NO_42	.524	0.444	.932	Valid
NO_43	.690	0.444	.925	Valid
NO_44	.370	0.444	.907	Tidak Valid
NO_45	.723	0.444	.949	Valid

r table = 0.444 N of Items = 45

N of Respondent = 20

HASIL UJI COBA RELIABILITAS
INSTRUMEN AKUNTABILITAS DENGAN PROGRAM SPSS

Item Total Statistics

No.	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
NO_1	113.2667	151.789	.875	.	.939
NO_2	113.4333	156.461	.574	.	.932
NO_3	113.2000	154.441	.766	.	.944
NO_4	113.4667	157.292	.673	.	.944
NO_5	113.9243	147.375	.473	.	.957
NO_6	113.4333	156.047	.693	.	.941
NO_7	113.0333	157.275	.666	.	.942
NO_8	113.4626	157.292	.639	.	.942
NO_9	113.4667	157.292	.779	.	.928
NO_10	113.7353	152.685	.590	.	.934
NO_11	113.2000	151.752	.878	.	.939
NO_12	113.5000	156.810	.596	.	.943
NO_13	113.4667	157.292	.437	.	.944
NO_14	113.0667	158.961	.555	.	.942
NO_15	113.6667	158.575	.367	.	.946
NO_16	113.1023	148.921	.553	.	.896
NO_17	113.2667	151.789	.864	.	.939
NO_18	113.1333	151.568	.789	.	.940
NO_19	113.4000	155.697	.473	.	.944
NO_20	113.1333	151.844	.842	.	.939
NO_21	113.0667	158.961	.534	.	.942
NO_22	113.2667	151.789	.845	.	.978
NO_23	113.4000	152.800	.497	.	.945
NO_24	113.4477	149.326	.415	.	.898
NO_25	113.0333	154.861	.702	.	.941
NO_26	113.0667	158.961	.550	.	.942
NO_27	113.3567	165.885	.450	.	.944
NO_28	113.2667	151.789	.689	.	.939
NO_30	113.4567	138.213	.789	.	.895

No.	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
NO_31	113.0667	158.961	.450	.	.942
NO_32	113.0667	158.961	.560	.	.942
NO_33	113.5000	156.810	.596	.	.943
NO_34	113.2433	148.737	.436	.	.998
NO_35	113.1667	158.213	.587	.	.939
NO_37	113.5060	156.121	.676	.	.916
NO_38	113.8338	148.489	.492	.	.932
NO_39	113.9345	150.133	.458	.	.919
NO_40	113.1098	158.921	.576	.	.928
NO_41	113.5631	155.702	.761	.	.923
NO_42	113.4672	152.326	.815	.	.921
NO_43	113.4339	156.461	.977	.	.942
NO_45	113.0383	158.516	.539	.	.943

Reliability Coefficient

No of Cases = 52 N of Items = 42

Alpha = .935